

PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 10 TAHUN 2001

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN TAHUNAN DAERAH

(REPETADA)

PROPINSI JAWA TENGAH

TAHUN 2002

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Propinsi Jawa Tengah Tahun 2001-2005, maka dipandang perlu menetapkan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (REPE-TADA) Propinsi Jawa Tengah Tahun 2002 dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. [Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950](#) tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah;

2. [Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. [Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999](#) tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan

Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

4. [Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000](#) tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000-2004 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 206);
5. [Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000](#), tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. [Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000](#), tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021);
7. [Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001](#) tentang Penyelenggaraan Dekon-sentrasi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4095).
8. [Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999](#) tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70).
9. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Propinsi Jawa Tengah Tahun 2001-2005. (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2001 Nomor 19).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROPINSI JAWA TENGAH

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN TAHUNAN DAERAH
(REPETADA) PROPINSI JAWA TENGAH TAHUN 2002.

Pasal 1

Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (REPETADA) Propinsi Jawa Tengah Tahun 2002 merupakan landasan dan pedoman operasional bagi Dinas, Badan, Kantor dan Satuan Kerja Pemerintah Propinsi Jawa Tengah dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan Tahun 2002.

Pasal 2

Sistematika Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (REPETADA) Propinsi Jawa Tengah Tahun 2002 disusun sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

BAB II : Prioritas Pembangunan Daerah

BAB III : Pembangunan Hukum, Keamanan dan Ketertiban

BAB IV : Pembangunan Politik

BAB V : Pembangunan Ekonomi

BAB VI : Pembangunan Kesejahteraan Rakyat dan Ketahanan Budaya

BAB VII : Pemberdayaan Daerah

BAB VIII : Pembangunan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

BAB IX : Pembiayaan Pembangunan

BAB X : Penutup

Pasal 3

Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (REPETADA) Propinsi Jawa Tengah Tahun 2002 berikut matriknya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Pelaksanaan lebih lanjut Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (REPETADA) Propinsi Jawa Tengah Tahun 2002 dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang

pada tanggal 7 September 2001

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

MARDIYANTO

Diundangkan di Semarang

pada tanggal 10 September 2001

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI

JAWA TENGAH

Pelaksana Harian

ttd

MULYADI WIDODO

Wakil Gubernur Jawa Tengah

Bidang Kesejahteraan Rakyat

LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH TAHUN 2001 NOMOR 39

BAB I

PENDAHULUAN

A. Umum.

Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (REPETADA) Propinsi Jawa Tengah Tahun 2002 merupakan rencana kegiatan operasional tahun kedua dari PROPEDA Propinsi Jawa Tengah Tahun 2001-2005. REPETADA ini disusun dengan mempertimbangkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan pada tahun-tahun sebelumnya dengan mencermati hasil-hasil yang telah dicapai, permasalahan yang dihadapi serta memperhatikan aspirasi masyarakat (*stakeholder*) yang dijangkau melalui berbagai forum seminar, diskusi dan diskusi kelompok terfokus.

Penyusunan REPETADA Propinsi Jawa Tengah Tahun 2002 dimaksudkan untuk memberikan landasan dan pedoman kebijakan operasional bagi Dinas, Badan, Kantor dan Satuan Kerja Pemerintah Propinsi Jawa Tengah dalam menyusun rencana program, proyek/kegiatan sesuai dengan peran, tugas pokok dan fungsi masing-masing di dalam tahapan pencapaian sasaran dan tujuan pembangunan daerah yang untuk selanjutnya dituangkan dalam RAPBD dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah, dinamika dan aspirasi yang berkembang di masyarakat.

Dengan demikian REPETADA ini diharapkan dapat mewujudkan keterpaduan perencanaan dan mempertajam prioritas kegiatan pembangunan dalam rangka mencapai hasil-hasil pembangunan secara merata dan optimal bagi kesejahteraan masyarakat.

Program dan proyek/kegiatan disusun dengan mendasarkan pada PROPEDA, Rencana Strategis (RENSTRA)

Dinas, Badan, Kantor, dan Satuan Kerja, serta menampung aspirasi masyarakat melalui mekanisme perencanaan pembangunan yang berlaku.

Landasan penyusunan REPETADA adalah TAP MPR RI Nomor IV/MPR/1999 Tentang Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) Tahun 1999-2004, Undang-Undang (UU) RI Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000-2004 dan Perda Propinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2001 Tentang Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Propinsi Jawa Tengah Tahun 2001-2005.

Sistematika REPETADA Propinsi Jawa Tengah Tahun 2002 terdiri dari sepuluh bab yaitu : Pendahuluan; Prioritas Pembangunan Daerah; Pembangunan Hukum, Keamanan dan Ketertiban; Pembangunan Politik; Pembangunan Ekonomi; Pembangunan Kesejahteraan Rakyat dan Ketahanan Budaya; Pemberdayaan Daerah; Pembangunan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; Pembiayaan Pembangunan; dan Penutup.

B. Kondisi Saat Ini.

1. Perekonomian.

Pertumbuhan ekonomi tahun 2000 sebesar 3,36 %, lebih rendah bila dibandingkan tahun 1999, yaitu 3,41%. Dengan pergantian kepemimpinan nasional yang dibantu oleh Kabinet Gotong Royong yang kondusif ini, diharapkan kondisi keamanan dan perekonomian mulai tahun 2001 akan lebih baik yang ditandai oleh menguatnya nilai tukar rupiah.

Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB sebesar 29,44%; sektor pertanian sebesar 25,55%; sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 22,44%; sektor jasa-jasa 8,77%; sektor pengangkutan dan komunikasi 4,42%; sektor

bangunan 3,75%; sektor pertambangan dan penggalian memberikan sumbangan relatif kecil yaitu 1,05 %. Demikian pula sektor listrik, gas dan air bersih sumbangannya hanya 0,68%.

Krisis ekonomi pertengahan tahun 1997 menyebabkan pendapatan perkapita tahun 1998 mengalami penurunan dari Rp 1.226.211,- menjadi Rp 1.073.830,- (menurun 12,43%). Namun pada tahun 1999 naik menjadi Rp 1.095.480,- atau 2,02%. Tahun 2000 pendapatan perkapita meningkat lebih besar menjadi Rp. 1.123.096 (2,52 %). Fluktuasi pendapatan per kapita ini berpengaruh pula terhadap aspek pemerataan, yang ditandai dengan naiknya Indeks Gini dari 0,252 tahun 1998 menjadi 0,260 tahun 1999, yang berarti tingkat kesenjangan meningkat.

Angka inflasi sebagai salah satu indikator stabilitas/perubahan harga di suatu wilayah mengalami kontraksi cukup besar. Tahun 1998 inflasi 67,19%, namun tahun 1999 menurun menjadi 1,51%. Tahun 2000 laju inflasi dibawah 2 digit yaitu 8,73%.

Nilai ekspor dan impor periode 1995-1999 berfluktuasi dari tahun ke tahun. Diharapkan kenaikan nilai ekspor tidak diikuti kenaikan nilai impor, karena akan berpengaruh terhadap neraca perdagangan. Pada tahun 1997 neraca perdagangan Jawa Tengah sebesar 390 juta US \$, namun sejak tahun 1998 hingga saat ini terus mengalami defisit. Tahun 1998 dan 1999 mengalami defisit 102 juta US \$ dan 203 juta US \$. Tahun 2000 (Januari–September) defisit sebesar 594 juta US \$. Salah satu penyebabnya adalah ketergantungan pada bahan baku impor untuk produk-produk ekspor.

Perkembangan perekonomian daerah tidak lepas dari peranan investasi yang ditanamkan baik melalui fasilitas PMA

dan PMDN maupun non fasilitas dari peran Usaha Kecil Menengah (UKM). Nilai investasi pembangunan non fasilitas pada periode 1997/1998 sampai dengan 1999/2000 berturut-turut mengalami penurunan dari 4.342,60 milyar rupiah, 3.641,58 milyar rupiah hingga 1.384,53 milyar rupiah. Namun pada tahun 2000 nilai investasi meningkat menjadi 3.134,02 milyar rupiah antara lain disebabkan oleh nilai tukar rupiah terhadap dollar semakin menurun.

2. Kesejahteraan Rakyat.

Masalah ketenagakerjaan ditandai oleh belum seimbangnya kesempatan kerja dengan ketersediaan tenaga kerja, yakni : (a) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mencapai 4,22 % pada tahun 2000; (b) Kualitas tenaga kerja masih relatif rendah, karena sebanyak 71,63 % tenaga kerja berpendidikan setinggi – tingginya SD, akibatnya berpengaruh pada tingkat produktivitas pekerja; dan (c) Rata – rata jam kerja per minggu hanya mencapai 37,72 jam, dan pekerja wanita 34,62 jam. Sempitnya kesempatan kerja dan beratnya beban keluarga mengakibatkan pekerja dengan status pekerja keluarga yang tidak dibayar relatif tinggi (19,57 %), sebagian besar adalah pekerja perempuan (13,16 %).

Di bidang kesehatan kasus penyakit tertentu masih tinggi, antara lain : malaria, 1,78 per 1.000 penduduk, demam berdarah dengue, 1,4 per 10.000 penduduk, tuberkulosis paru dengan Bakteri Tahan Asam (BTA) positif 6,9 %, diare 14,4 %, dan Infeksi Saluran Pernafasan Atas (ISPA) 24,21 %. Pelayanan persalinan yang ditolong oleh dukun masih relatif tinggi (36 %), kasus HIV sebanyak 25 penderita dan AIDS 4 kasus. Angka kematian bayi 36,6 per 1.000 kelahiran dan angka kematian ibu 152 per 10.000 kelahiran. Sementara itu cakupan air bersih

71,03 % dan penggunaan jamban yang memenuhi syarat kesehatan baru 51,58 % serta Saluran Pembuangan Air Limbah (SPAL) 27,40 %.

Penduduk berumur 10 tahun keatas sebanyak 71,63 % berpendidikan SD. Angka partisipasi kasar SD mencapai 106, 29 %, tingkat SLTP baru mencapai 79,15 % dan tingkat SLTA hanya sebesar 38,72 %. Angka transisi ke SLTP sebesar 81,68 %, dan SLTA 50,42 %. Hal tersebut antara lain disebabkan oleh tingkat kemampuan orang tua yang relatif rendah, serta keterbatasan daya tampung SLTP dan SLTA.

Permasalahan kebudayaan yang masih dihadapi antara lain derasnya arus informasi dan nilai-nilai budaya asing yang tidak sesuai dengan nilai budaya bangsa, kurangnya pemahaman akan arti pentingnya pendidikan moral dan budi pekerti yang menyebabkan timbulnya budaya hedonisme dan sangat permisif terhadap pergeseran nilai – nilai etika dan moral. Disamping itu belum optimalnya dukungan masyarakat dibidang kesenian dan kebudayaan serta lembaga/organisasi seni budaya dalam memberikan kontribusi positif untuk meningkatkan apresiasi seni budaya.

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) relatif besar, yang ditunjukkan oleh jumlah anak terlantar 260.233 orang, anak nakal 25.211 orang dan anak jalanan 8.507 orang, Tuna Susila 7.118 orang serta Pengemis Gelandangan dan Orang Terlantar (PGOT) 4.430 orang. Sementara kemampuan pelayanan pemerintah baik di panti maupun di luar panti terbatas.

Penghayatan dan pengamalan agama dalam kehidupan sehari-hari belum optimal yang mengakibatkan meningkatnya tindak kriminal serta penghargaan terhadap orang tua semakin

menurun. Globalisasi informasi menjadikan semakin mudah akses informasi yang sulit dibendung dan lemahnya pengawasan dari orang tua, serta kurangnya penanaman ajaran-ajaran agama, menyebabkan semakin maraknya pemakaian obat-obat terlarang di kalangan masyarakat.

Laju pertumbuhan penduduk mengalami penurunan (0,82 %), namun pertumbuhan absolut masih tinggi. Jumlah keluarga miskin (Pra KS dan KS 1) mengalami peningkatan yaitu dari 58,52 % pada tahun 1999 menjadi 61,04 % pada tahun 2000. Angka Droup Out Keluarga Berencana pada Wanita Usia Subur (WUS) usia 15 – 49 tahun mengalami peningkatan dari 12,7 % pada tahun 1997 menjadi 15,5 % pada tahun 1999. Pasangan Usia Subur (PUS) yang tidak terlayani (*unmetneed*) dalam bidang kesehatan reproduksi sebesar 13,64 %, partisipasi pria dalam berkeluarga berencana relatif kecil.

Dalam kehidupan sehari-hari masih terlihat adanya bias gender, antara lain tampak dari relatif lebih rendahnya hak yang diterima perempuan di bidang ketenagakerjaan dan masih relatif tingginya angka perempuan kawin pertama di bawah 17 tahun. Hal tersebut dilatarbelakangi pandangan masyarakat bahwa kedudukan perempuan di dalam keluarga bukan sebagai penentu kebijakan. Disisi lain kesiapan anak dan remaja, terutama anak dan remaja perempuan masih memerlukan pembinaan untuk dapat berperan sebagai calon orang dewasa secara fisik dan mental.

3. Pembangunan Daerah dan Pengembangan Masyarakat.

Penyelenggaraan pemerintahan telah bergeser, yaitu dari sentralistik menjadi desentralistik. Hal ini ditandai dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 disertai perangkat peraturan pelaksanaannya. Namun pelaksanaannya

belum optimal, karena ketergantungan pemerintah Kabupaten/Kota terhadap pemerintah Propinsi dan Pusat masih relatif besar, disisi lain kemauan berotonomi sangat tinggi.

Pengelolaan pembangunan belum sepenuhnya melibatkan masyarakat. Hal ini berakibat, program/proyek pemerintah dirasakan kurang bermanfaat dan kurang didayagunakan oleh masyarakat, karena tidak sesuai dengan aspirasi, potensi dan kebutuhan masyarakat.

Dalam era otonomi, daerah diberikan kewenangan untuk merencanakan pembangunan daerahnya sendiri sesuai dengan permasalahan aspirasi, potensi serta kebutuhan masyarakat dan daerah. Partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan diperlukan melalui pelibatan tokoh-tokoh masyarakat untuk mendorong dan menggali potensi termasuk mengoptimalkan dana masyarakat, sebagai wujud kemandirian, sehingga ketergantungan pada dana dari pemerintah semakin berkurang.

Paradigma pemberdayaan masyarakat merupakan alternatif, dimana dalam paradigma ini masyarakat dituntut untuk berperan aktif dalam proses pembangunan, termasuk meningkatkan fungsi kontrol dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya.

4. Penegakan Hukum, Keamanan dan Ketertiban Masyarakat serta Hak Asasi Manusia (HAM).

Kemampuan dan kemauan memahami perbedaan di dalam masyarakat berada pada situasi problematik. Budaya penyampaian pendapat serta aspirasi secara arif dan bijaksana, adalah penting sekali dalam rangka memahami cara menafsirkan demokrasi. Demikian pula dengan partisipasi dalam pengambilan keputusan yang aktual masih belum menggunakan mekanisme demokrasi.

Masalah penegakan hukum secara kualitatif yang dihadapi Propinsi Jawa Tengah tidak jauh berbeda dengan Propinsi lain di Indonesia, karena konteks pembangunan hukum berkaitan dengan sistem hukum yang berlaku secara nasional. Persoalan-persoalan di bidang hukum disamping relatif rendahnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dan aparaturnya terhadap hukum juga karena adanya kendala atau hambatan dalam pelaksanaan penegakan hukum oleh aparaturnya.

5. Pemerintahan Daerah dan Otonomi Daerah.

Dalam bidang pemerintahan daerah permasalahan yang terjadi adalah belum optimalnya kinerja aparaturnya dalam menjalankan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Disamping itu juga jumlah aparat pemerintah lebih besar dari kebutuhan riil, sebagai akibat dari perubahan kewenangan Pemerintah Propinsi dan adanya pengintegrasian instansi pusat ke dalam Pemerintahan Daerah. Disisi lain tuntutan masyarakat atas kualitas pelayanan aparat semakin tinggi, sementara itu ketersediaan sarana terbatas dalam rangka mengimbangi tuntutan masyarakat tersebut.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, permasalahannya adalah rendahnya pemahaman aparat dan masyarakat tentang hakekat otonomi daerah, belum lengkapnya peraturan pelaksanaan yang mendukung pelaksanaan otonomi daerah, serta rendahnya kemampuan keuangan daerah dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan.

Dalam rangka memecahkan permasalahan tersebut terdapat potensi pendukung yang perlu dikembangkan, yaitu motivasi aparaturnya pemerintah dalam menyikapi reformasi dan otonomi serta adanya iklim kondusif masyarakat dalam mendukung pelaksanaan pemerintahan dan otonomi daerah.

6. Pembangunan Berwawasan Lingkungan.

Lingkungan hidup sebagai wahana kegiatan dan faktor produksi telah menjadi suatu komoditas penting dalam mendukung proses pertumbuhan ekonomi wilayah. Pemahaman ini mendorong pemerintah, swasta dan masyarakat semakin meningkatkan eksploitasi lingkungan hidup, karena memiliki nilai ekonomi, seperti sumber-sumber air bersih, hutan alam, dan plasma nutfah. Sebagian aparat pemerintah, pengusaha maupun masyarakat belum memahami konsep daya dukung lingkungan hidup, guna penyelamatan dan pelestarian. Keterbatasan pemahaman dan kesadaran masyarakat ini menunjukkan adanya kelemahan secara struktural maupun sosial budaya masyarakat. Kondisi ini telah mengganggu kelestarian fungsi lingkungan dalam mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya dalam berbagai skala (lokal, regional, nasional maupun internasional). Dalam jangka pendek dan panjang, gangguan atau kerusakan fungsi lingkungan yang melampaui batas kemampuannya akan menimbulkan bencana yang merugikan dan atau korban jiwa masyarakat sekitar, seperti : kekeringan, bencana alam, tanah longsor dan lainnya.

Dewasa ini gejala kerusakan lingkungan telah berkembang dari wilayah perkotaan ke perdesaan. Pertambahan luas lahan kritis pada berbagai Daerah Aliran Sungai (DAS), tingginya tingkat erosi tanah beberapa wilayah serta tingginya pencemaran air di sungai-sungai akibat perkembangan industri merupakan fenomena yang berkembang saat ini. Apabila kondisi ini terjadi terus menerus dalam jangka menengah akan menimbulkan pencemaran di pantai, pesisir dan perairan laut.

Dalam upaya memecahkan permasalahan tersebut terdapat potensi yang perlu dikembangkan seperti tingginya

komitmen Pemerintah Daerah untuk menopang pembangunan berkelanjutan dengan melakukan perubahan struktural maupun sosial masyarakat dan meningkatnya kesadaran dan kontrol masyarakat.

BAB II

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Permasalahan pokok yang terjadi di Jawa Tengah pada saat ini adalah lemahnya penegakan hukum, masih tingginya gangguan keamanan, ketertiban dan masih rendahnya penghargaan terhadap Hak Azasi Manusia (HAM), belum pulihnya kondisi ekonomi, kemiskinan, pengangguran, rendahnya tingkat pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, lemahnya pelaksanaan tatalaksana pemerintahan, kurang berkembangnya kapasitas pembangunan daerah dan pemberdayaan masyarakat, dan masih rendahnya pemahaman tentang otonomi daerah, serta lemahnya kualitas pelaksanaan pembangunan berwawasan lingkungan.

Pada tahun 2001 pertumbuhan ekonomi diprediksikan sebesar 3,16 %, hal ini disebabkan adanya kenaikan harga Bahan-Bakar Minyak (BBM), tarif telpon dan listrik. Namun pada tahun 2002 apabila kondisi perekonomian semakin membaik yang didukung pula oleh kondisi sosial, politik dan keamanan yang stabil maka pertumbuhan ekonomi akan mencapai 3,5 %. Dengan asumsi angka Incremental Capital Output Ratio (ICOR) sebesar 4 serta inflasi antara 6-8 %, maka perkiraan kebutuhan pembiayaan pembangunan tahun 2002 akan mencapai Rp. 6.488,66 milyar yang diharapkan 65 % dapat disediakan melalui sektor swasta dan masyarakat, sedangkan 35 % dari pemerintah.

Pembiayaan pembangunan dari pemerintah pusat melalui dana perimbangan diperkirakan sebesar Rp. 900,90 milyar atau naik 26 % dari tahun 2001. Sedangkan dari Pendapatan Asli Daerah Sendiri (PADS) Propinsi diharapkan mencapai Rp. 622,90 milyar atau naik 25 % dari pendapatan tahun 2001. Prediksi penerimaan daerah dari pusat diperkirakan mencapai Rp. 1.120,00 milyar atau naik 20 % dibanding tahun 2001, sedangkan kebutuhan biaya pembangunan tahun 2002 diperkirakan mencapai Rp. 403,8 milyar atau

naik 30 % dari tahun 2001. Kebutuhan biaya pembangunan lainnya diharapkan dari Kabupaten/Kota sebesar Rp. 1.014,78 milyar.

Di sisi lain pendapatan perkapita diharapkan akan mengalami kenaikan yang cukup berarti bagi masyarakat. Prediksi PDRB perkapita pada tahun 2001 sebesar Rp. 1.330.046,40 meningkat menjadi Rp. 1.362.516,68 pada tahun 2002. Untuk itu sektor-sektor potensial yang perlu mendapatkan dorongan yaitu industri pengolahan; perdagangan; hotel dan restoran; serta pertanian.

Pada tahun 2002 diharapkan ada peningkatan dalam hal penegakan supremasi hukum, peningkatan pelayanan sosial dasar dibidang pendidikan, kesehatan dan peningkatan daya beli masyarakat. Hal ini merupakan landasan bagi upaya percepatan pemulihan kondisi ekonomi dan langkah untuk membangun basis perekonomian kerakyatan di masa depan.

Dengan mengacu PROPEDA Propinsi Jawa Tengah Tahun 2001-2005 dan mempertimbangkan latar belakang kondisi faktual dan keterkaitan antar masalah, kemampuan pembiayaan, serta tantangan yang dihadapi, maka strategi dan kebijakan perencanaan pembangunan daerah Jawa Tengah disusun melalui pendekatan pemecahan masalah terutama yang menjadi kewenangan Propinsi sebagai daerah otonom dengan tetap mempertimbangkan asas dekonsentrasi serta memperhatikan aspirasi dan permasalahan yang berkembang di Kabupaten/Kota maupun di tingkat Nasional.

Oleh karena itu prioritas pembangunan diarahkan untuk : melanjutkan program kegiatan penuntasan pemecahan masalah yang belum terselesaikan pada tahun sebelumnya; program kegiatan yang berorientasi pada upaya pemecahan masalah mendesak; program kegiatan yang berorientasi langsung pada kebutuhan masyarakat terutama yang memiliki daya ungkit tinggi terhadap perekonomian rakyat dan peningkatan sarana prasarana pelayanan sosial dasar masyarakat; program kegiatan yang dapat menunjang stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat; serta program kegiatan yang berorientasi pada kepedulian terhadap permasalahan Kabupaten/Kota yang memiliki aspek peningkatan hubungan antara Propinsi dengan Kabupaten/Kota maupun antar

Kabupaten/Kota; serta program kegiatan yang berorientasi pada pengembangan atau pertumbuhan kawasan/daerah baik yang berskala lokal, regional, maupun nasional.

Dengan mempertimbangkan kompleksnya permasalahan yang dihadapi dan target yang ingin dicapai serta keterbatasan pendanaan untuk upaya pemecahannya maka prioritas pembangunan daerah Jawa Tengah pada tahun 2002 dirumuskan sebagai berikut :

A. Pemulihan Kondisi Ekonomi

Prioritas pembangunan untuk pemulihan ekonomi meliputi :

1. Pengembangan koperasi usaha kecil dan menengah dengan memperkuat infrastruktur dan lembaga-lembaga pendukungnya serta pengembangan pola-pola kemitraan yang telah ada.
2. Pengembangan produk berorientasi ekspor dan penguatan jaringan pemasaran.
3. Pengembangan kegiatan investasi melalui berbagai kegiatan promosi dan peningkatan pelayanan serta kemudahan dalam penanaman modal.
4. Peningkatan ketahanan pangan dan pengembangan agrobisnis, melalui diversifikasi, intensifikasi, ekstensifikasi dan rehabilitasi pertanian baik hulu maupun hilir.
5. Pengembangan kehutanan untuk mendukung fungsi ekonomi dan keseimbangan tata lingkungan secara berkelanjutan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan.
6. Pengembangan sistem distribusi untuk lebih menjamin pemerataan ketersediaan barang maupun jasa dan pengendalian harga.
7. Pengembangan sarana dan prasarana ekonomi.
8. Pengembangan “Kawasan Pengembangan Ekonomi”.

9. Pengembangan pariwisata melalui kegiatan promosi dan peningkatan sarana dan prasarana.

B. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

Prioritas pembangunan peningkatan kesejahteraan masyarakat meliputi :

1. Pemerataan pelayanan kesehatan masyarakat dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam bidang kesehatan.
2. Peningkatan kegiatan pelayanan dan rehabilitasi sosial serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial.
3. Rehabilitasi sarana dan prasarana pendidikan, pemerataan pelayanan pendidikan masyarakat dan peningkatan kualitas manajemen dan kemandirian sekolah.
4. Perluasan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha pada berbagai sektor, dan pengembangan sistem informasi ketenagakerjaan yang dapat diakses oleh masyarakat.
5. Peningkatan ketrampilan, profesionalisme tenaga kerja dan peningkatan produktivitas masyarakat.
6. Pemberdayaan perempuan, anak dan remaja.

C. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Prioritas pembangunan peningkatan kualitas pelayanan publik meliputi:

1. Peningkatan akses informasi masyarakat dan pemberian pelayanan prima kepada masyarakat.
2. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
3. Peningkatan kualitas pengawasan fungsional, pengawasan melekat dan pengawasan masyarakat.

D. Pemberdayaan dan Pengembangan Masyarakat

Prioritas pembangunan pemberdayaan dan pengembangan masyarakat adalah fasilitasi pengembangan masyarakat.

E. Penegakan Hukum, Keamanan dan Ketertiban Masyarakat serta HAM.

Prioritas pembangunan penegakan hukum keamanan dan ketertiban masyarakat meliputi :

1. Penyusunan dan pembaharuan produk-produk hukum hukum di daerah.
2. Peningkatan kesadaran dan kepatuhan hukum.
3. Penerapan dan penegakan hukum serta HAM.
4. Peningkatan sarana dan prasarana hukum

F. Pembangunan Politik.

Prioritas pembangunan politik, meliputi :

1. Fasilitasi penyelenggaraan pendidikan politik rakyat dan pengembangan sistem politik.
2. Peningkatan peran lembaga legislatif.
3. Fasilitasi/dukungan penyelenggaraan Pemilu 2004 dan sosialisasi sistem Pemilu.

G. Percepatan Pelaksanaan Otonomi Daerah

Prioritas pembangunan percepatan pelaksanaan otonomi daerah meliputi :

1. Peningkatan pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan tentang otonomi daerah.
2. Penataan dan pengembangan sistem manajemen pemerintahan dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan otonomi daerah.

3. Peningkatan pemahaman dan partisipasi pelaku pembangunan dalam pelaksanaan otonomi daerah.

H. Pelestarian Sumberdaya Alam dan Lingkungan.

Prioritas pembangunan pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan meliputi:

1. Pengelolaan potensi sumber daya alam, lingkungan alam, dan lingkungan buatan sesuai dengan kemampuan daya dukung lingkungan.
2. Peningkatan kemitraan pengelolaan lingkungan, peningkatan kesadaran masyarakat dan mediasi penyelesaian masalah.
3. Pengendalian pencemaran lingkungan.
4. Pengendalian eksplorasi sumber daya kelautan.

BAB III

PEMBANGUNAN HUKUM, KEAMANAN DAN KETERTIBAN

A. Hukum.

Reformasi hukum dalam rangka mewujudkan supremasi hukum, hingga kini belum sepenuhnya dapat dilaksanakan secara optimal. Sebagian masyarakat mempunyai persepsi bahwa reformasi diartikan sebagai suatu kebebasan untuk melaksanakan kehidupan tanpa memperdulikan peraturan-peraturan/norma-norma hukum yang ada. Disisi lain, aparat hukum dirasakan belum sepenuhnya melaksanakan penegakan hukum dan HAM yang memenuhi rasa keadilan. Keadaan ini merupakan cermin masih rendahnya tingkat kesadaran dan kepatuhan hukum oleh masyarakat maupun aparat hukum. Selain itu peraturan-peraturan hukum yang ada belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan tuntutan aspirasi masyarakat.

Rendahnya pemahaman dan penghargaan terhadap HAM menyebabkan adanya diskriminasi hukum, tidak adanya transparansi hukum dan tidak konsistennya penerapan hukum. Disamping itu rendahnya integritas moral dan profesionalisme aparat hukum menyebabkan masyarakat kurang percaya pada penegakan hukum, sehingga masyarakat memilih jalur yang justru melanggar hukum, yaitu main hakim sendiri atau pengadilan jalanan.

Pelayanan informasi hukum kepada masyarakat juga dirasakan kurang optimal, antara lain disebabkan oleh belum operasionalnya layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi (JDI) hukum sebagai sarana penyebaran informasi hukum secara cepat, tepat dan transparan.

Memperhatikan permasalahan diatas, kebijakan yang akan ditempuh adalah : (a) penyusunan dan penyempurnaan produk-produk hukum di daerah yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat; (b) pengembangan budaya hukum melalui peningkatan kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat dan aparat hukum; (c) penegakan hukum dan HAM secara tegas, manusiawi berdasarkan keadilan dan kebenaran; (d) peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur hukum; (e) peningkatan sarana dan prasarana hukum serta peningkatan layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi (JDI) hukum.

Sasaran yang akan dicapai yaitu : (a) tersusunnya produk-produk hukum daerah yang sesuai dengan kondisi daerah dan aspirasi masyarakat; (b) berkembangnya budaya hukum untuk menciptakan kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat dan aparat hukum; (c) tegaknya supremasi hukum dan penghargaan terhadap Hak Azasi Manusia (HAM); (d) meningkatnya kemampuan dan kualitas aparatur hukum; (e) tersedianya sarana dan prasarana hukum yang memadai guna peningkatan pelayanan hukum kepada masyarakat.

Untuk mencapai sasaran pembangunan hukum ditempuh program sebagai berikut :

1. Penyusunan dan Pembaharuan Produk-Produk Hukum di Daerah.

Kegiatannya meliputi : (a) Inventarisasi dan penyusunan RAPERDA tentang Pajak dan Retribusi Daerah yang meliputi : Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Pemanfaatan Air Permukaan, Pajak Pemakaian Air Bawah Tanah, Pajak Kendaraan Atas Air dan Bea Balik Nama Kendaraan Atas Air, inventarisasi dan penyusunan aturan hukum dengan menindaklanjuti peraturan yang sudah ada maupun menggali dan

menghormati aturan-aturan adat yang diformalkan, sedangkan kegiatan inventarisasi dan penyusunan Perda Retribusi meliputi : retribusi perairan dan bandar, sarana bantu navigasi, frekuensi radio lokal; (b) Penyempurnaan produk-produk hukum tentang Retribusi yaitu Perubahan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Villa dan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 1999 tentang Retribusi Penjualan Usaha Produksi Daerah; (c) Penetapan Keputusan dan Surat Keputusan Gubernur tentang Pelaksanaan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.

2. Peningkatan Kesadaran dan Kepatuhan Hukum.

Kegiatannya meliputi : (a) Penyuluhan hukum tentang Pajak dan Retribusi Daerah dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah; (b) Fasilitasi dan sosialisasi Undang-undang Tentang Hak Azasi Manusia (HAM) dan Undang-undang Bidang Pertanahan.

3. Penerapan dan Penegakan Hukum serta HAM.

Kegiatannya meliputi : (a) Penegakan Perda tentang Pajak dan Retribusi; (b) Fasilitasi penegakan hukum dalam rangka pengamanan hasil hutan dan peredaran hasil hutan; (c) Dukungan/pemberian bantuan hukum kepada LBH/LKBH; (d) Perlindungan hukum pelaksanaan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI); (e) Bimbingan Teknis kuasa hukum Pemerintah Daerah; (f) Bimbingan teknis Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

4. Peningkatan Sarana dan Prasarana Hukum.

Kegiatannya meliputi : (a) Penyempurnaan perangkat lunak naskah cetak peraturan atau Properat (Program Pencarian Peraturan); (b) Pembuatan Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

B. Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.

Krisis ekonomi yang berkembang menjadi krisis multi dimensi mendorong sebagian masyarakat untuk melakukan tindakan pelanggaran hukum dan kriminal yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Disamping itu adanya perubahan dan dinamika masyarakat yang begitu cepat, seiring dengan perubahan keadaan sosial politik, membawa implikasi pada segala bidang kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat.

Permasalahan lainnya adalah meningkatnya potensi konflik kepentingan dan pengaruh negatif arus globalisasi terhadap berbagai sendi kehidupan masyarakat. Keadaan ini diperberat dengan adanya beberapa daerah yang terkena musibah/bencana yang perlu penanggulangan dan penanganan.

Sebagai upaya untuk menangani permasalahan tersebut perlu mendayagunakan budaya gotong-royong, Sistim Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Siskamtibmas) Swakarsa dan Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas) untuk menumbuhkan kemandirian masyarakat sebagai daya tangkal terhadap kemungkinan ancaman dan gangguan yang akan terjadi termasuk didalamnya gangguan akibat bencana.

Kebijakan untuk mengatasi permasalahan tersebut ditempuh melalui : (a) peningkatan kamtibmas, pertahanan sipil dan unsur rakyat terlatih lainnya agar mampu berperan dalam menanggulangi ancaman dan gangguan yang terjadi; (b) peningkatan rasa persatuan dan kesatuan bangsa melalui :

penciptaan iklim kondusif, menghidupkan kembali nilai-nilai luhur kegotong-royongan dan pengembangan sikap kesetiakawanan yang melibatkan seluruh komponen masyarakat; (c) peningkatan partisipasi rakyat terlatih; (d) peningkatan pemasyarakatan Pendidikan Pendahuluan Bela Negara (PPBN) kepada masyarakat dalam upaya menumbuhkembangkan kesadaran bela negara sejak dini.

Sasaran yang akan dicapai adalah : (a) terjaminnya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat; (b) terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa serta terhindarnya ancaman yang dapat mengganggu keamanan dan ketentraman setiap warga negara dalam melakukan kegiatan; (c) meningkatnya kemampuan anggota satuan perlindungan masyarakat utamanya dalam penanggulangan bencana; (d) tumbuh dan berkembangnya kesadaran bela negara, kemandirian dan daya tangkal masyarakat yang tangguh dalam menghadapi ancaman serta gangguan keamanan.

Untuk mencapai sasaran pembangunan keamanan dan ketertiban umum ditempuh program sebagai berikut :

1. Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.

Kegiatannya meliputi : (a) Rapat koordinasi pengamanan (Rakor PAM); (b) Penanganan eks G 30 S / PKI; (c) Monitoring dampak sosial harga sembako; (d) Dukungan pengamanan tamu/pejabat negara; (e) Fasilitasi pengerahan anggota Linmas; (f) Posko Siaga.

2. Peningkatan Persatuan dan Kesatuan Bangsa.

Kegiatan dilaksanakan melalui fasilitasi dan mediasi peningkatan kesatuan bangsa, meliputi : (a) Rapat koordinasi kesatuan bangsa; (b) Forum Wawasan Kebangsaan; (c) Seminar dan

second opinion tentang kesatuan bangsa; (d) Pemasyarakatan himpunan peraturan bidang kesatuan bangsa; (e) Temu Karya Tim Penggerak Pembauran (TPP); (f) Sosialisasi kewaspadaan nasional; (g) Mediasi penanganan masalah strategis yang berdampak politis; (h) Evaluasi bidang kesatuan bangsa.

3. Peningkatan Rakyat Terlatih (Ratih) dan Perlindungan Masyarakat (Linmas).

Kegiatannya meliputi : (a) Peningkatan kemampuan anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas); (b) Peningkatan kemampuan Pusat Pengendalian Operasional Penanggulangan Bencana (Pusdalop PB).

4. Peningkatan Kesadaran Bela Negara.

Kegiatannya melalui penataran kader Pendidikan Pendahuluan Bela Negara (PPBN) anggota Linmas.

BAB IV

PEMBANGUNAN POLITIK

Seiring bergulirnya proses reformasi, kran demokrasi dan komunikasi telah dibuka lebar. Namun budaya politik demokratis, sikap dan perilaku berpolitik yang menghargai perbedaan pandangan dalam membangun masyarakat belum terarah secara baik. Aspirasi masyarakat belum sepenuhnya terartikulasi dan teragregasikan secara transparan dan konsisten. Interes atas kepentingan dalam pengambilan keputusan masih terasa dalam kehidupan politik, baik yang datang dari elit politik, penyelenggara pemerintahan, maupun kelompok-kelompok kepentingan. Di lain pihak, institusi pemerintah tidak jarang berada pada posisi yang dilematis dalam menghadapi sikap dan perilaku masyarakat yang saat ini berkembang.

Kemajemukan masyarakat mengandung benih konflik, seperti eksistensi kegiatan pilkada dan pilkades, konflik horizontal antar warga di berbagai daerah menjadi ancaman keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa. Di samping itu, tumbuh dan berkembangnya partai politik dan organisasi massa yang berorientasi agama, etnis dan kedaerahan merupakan tantangan dalam mewujudkan sistem politik yang stabil, transparan dan demokratis.

Kebijakan pembangunan politik yang ditempuh, adalah : (a) fasilitasi penyelenggaraan pendidikan politik dan pengembangan sistem politik; (b) peningkatan peran lembaga legislatif; (c) fasilitasi/dukungan persiapan penyelenggaraan Pemilu 2004 dan sosialisasi sistem Pemilu.

Sasaran yang akan dicapai, adalah : (a) semakin diipahaminya peran komunikasi, etika dan moral politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang kondusif.; (b) meningkatnya komunikasi hubungan

antar lembaga dalam penyerapan aspirasi masyarakat; (c) Mantapnya penyiapan penyelenggaraan Pemilu 2004.

Untuk mencapai sasaran pembangunan politik ditempuh program sebagai berikut :

1. Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik Rakyat dan Pengembangan Sistem Politik.

Kegiatannya adalah : (a) Fasilitasi penyelenggaraan pendidikan politik rakyat, yang meliputi : forum Muspida dengan pimpinan Partai Politik, forum komunikasi antar Partai Politik, forum komunikasi dan konsultasi tokoh masyarakat dan tokoh agama, forum komunikasi organisasi masyarakat; (b) Pengembangan sistem politik, yang meliputi : temu muka Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri (PTN) / Perguruan Tinggi Swasta (PTS), fasilitasi kegiatan seminar bagi PTN/PTS, Ormas dan LSM.

2. Peningkatan Peran Lembaga Legislatif.

Kegiatannya adalah peningkatan hubungan antar lembaga melalui : Dialog interaktif antar eksekutif dan legislatif.

3. Fasilitasi / Dukungan Penyelenggaraan Pemilu 2004 dan Sosialisasi Sistem Pemilu.

Kegiatannya adalah fasilitasi persiapan penyelenggaraan Pemilu 2004 melalui : (a) Rapat koordinasi dalam rangka persiapan Pemilu; (b) Penyiapan sarana dan prasarana Pemilu.

BAB V

PEMBANGUNAN EKONOMI

A. Pertanian dan Kehutanan.

1. Pertanian.

Kontribusi sektor pertanian terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tahun 2000 sebesar 20,36%. Laju pertumbuhan PDRB pertanian berdasarkan harga konstan tahun 1996-1998 mengalami penurunan rata-rata sebesar minus 3,28 % per tahun. Namun pada tahun 1998 - 2000 meningkat kembali menjadi rata-rata 2,14 % per tahun. Nilai Tukar Petani (NTP) rata-rata tahun 1996-1998 berturut-turut adalah 109, 104,2 dan 94. Pada tahun 2000 NTP kembali turun menjadi 90.

Ketersediaan pangan yang dihitung dari jumlah energi yang tersedia untuk dikonsumsi penduduk per hari selama tahun 1998 menunjukkan bahwa untuk komoditas padi-padian, makanan berpati dan gula sudah melebihi standar Pola Pangan Harapan (PPH) penduduk Jawa Tengah. Untuk komoditas buah/sayur dan pangan hewani masih dibawah standar PPH, masing-masing sebesar 92 Kilo kalori per Kapita (Kcal/Kap) sementara standar PPH buah dan sayur 125 Kcal/Kap, serta PPH pangan hewani 105 Kcal/Kap (standar PPH pangan hewani 382 Kcal/Kap).

Luas panen tanaman padi, jagung dan kedelai tahun 2000 berturut-turut 1.669.486 Ha, 581.893 Ha dan 147.305 Ha. Sementara luas panen bawang merah, bawang putih dan kentang relatif sedikit masing-masing 25.830 Ha, 5.384 Ha dan 6.685 Ha. Luas panen komoditas padi dan jagung dari tahun 1996-2000

meningkat rata-rata sebesar 1,01 % dan 1,6 % per tahun. Sementara komoditas kedelai dan kentang mengalami penurunan sebesar 5,61 % dan 18,10 % per tahun.

Produksi padi dan jagung tahun 2000 adalah 8.469.430 Kwintal (Kwt) dan 1.633.818 Kwt. Sementara produksi bawang merah dan kentang masing-masing sebesar 2.123.124 Kwt dan 1.122.341 Kwt. Produksi padi dan jagung dari tahun 1996-2000 meningkat rata-rata 0,35 % dan 1,62 % per tahun. Namun produksi kedelai, kentang dan bawang putih mengalami penurunan rata-rata 4,86 %, 18,46 % dan 8,83 % per tahun.

Perkebunan ikut memberikan kontribusi bagi pembangunan pertanian. Luas areal perkebunan di Jawa Tengah adalah 712.054 ha, terdiri dari perkebunan rakyat 657.306 ha (92,3 %), perkebunan besar negara 36.633 ha (5,2 %) dan perkebunan besar swasta 18.114 ha (2,5 %). Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar perkebunan di Jawa Tengah adalah perkebunan milik rakyat dengan pengelolaan yang belum optimal. Akibatnya produktivitas, kualitas dan nilai tambah hasil perkebunan masih rendah. Disamping itu lemahnya permodalan dan iptek masih menjadi hambatan pembangunan perkebunan.

Pembangunan peternakan dari tahun 1999-2000 menunjukkan hasil sebagai berikut : peningkatan populasi terbesar terjadi pada ternak burung puyuh (73,40 %), sedangkan terendah pada ternak ayam ras pedaging (0,43 %). Populasi sapi potong mengalami peningkatan 6,53 % dan sapi perah 9,18 %. Namun populasi kerbau dan angsa mengalami penurunan masing-masing 0,12 % dan 1,89 %.

Produksi total daging tahun 2000 mengalami penurunan dibandingkan tahun 1999 sebesar 0,42 % (728.589 kg). Namun produksi daging sapi mengalami peningkatan sebesar 38,69 %,

akibat berkurangnya permintaan daging ternak unggas (ayam buras dan ayam ras). Sementara produksi susu dan telur dari tahun 1999-2000 mengalami kenaikan masing-masing 16,39 % (1.121.321 liter) dan 26,72 % (24.064.778 kg).

Konsumsi daging, telur, susu dan protein hewani penduduk Jawa Tengah tahun 2000 masing-masing sebesar 5,32 kilo gram per kapita per tahun (kg/kap/th), 3,16 kg/kap/th, 3,38 ltr/kap/th dan 3,93 gr/kap/th. Pemotongan ternak sapi dan babi tahun 2000 mengalami peningkatan dibanding tahun 1999 masing-masing sebesar 12,12 % dan 6,79 %, sedangkan pemotongan ternak lain mengalami penurunan. Pemotongan ternak yang tidak tercatat di Rumah Pemotongan Hewan (RPH) masih relatif besar.

Jumlah dan nilai ekspor hasil ternak tahun 2000 mengalami penurunan cukup tinggi dibanding tahun 1999. Jumlah ekspor kulit sapi mengalami penurunan sebesar 52,51 %, sementara ekspor sarang burung walet menurun sebesar 34,93 %.

Kondisi perikanan di Jawa Tengah menunjukkan bahwa sekitar 80 % total produksi perikanan berasal dari laut, dengan kontribusi terbesar dari kawasan Pantai Utara. Sementara produksi perikanan darat (air tawar dan payau) mencapai lebih kurang 20 %, dengan kontribusi terbesar dari hasil pertambakan. Kontribusi lainnya berasal dari kolam rakyat, karamba, mina padi dan perairan umum (waduk, rawa/telaga dan sungai).

Eksplorasi produksi ikan kawasan laut Pantura sudah berlebihan, khususnya pada kawasan laut dibawah 4 mil. Oleh karena itu kebijakan pengembangan penangkapan ikan diarahkan ke perikanan samudera. Pengembangan tambak menghadapi kendala semakin menurunnya kualitas air yang disebabkan oleh pencemaran laut, pencemaran daerah hulu melalui sungai, dan hilangnya areal bakau. Hal ini mempengaruhi produktivitas

tambak udang. Pengembangan perikanan air tawar masih mengalami kendala yaitu ketersediaan benih, harga pakan, jaringan pemasaran serta sarana dan prasarana penangkapan yang belum memadai.

Jumlah kelompok tani dan nelayan (KT) di Jawa Tengah sebanyak 34.061 KT dengan jumlah anggota 2.393.743 orang. Sebagian besar KT masih berada pada kelas pemula dan lanjut masing-masing sebesar 27,6 % dan 43,4 %. Sementara yang berada pada kelas madya dan utama sebesar 21,5 % dan 7,3 %. Hal ini menunjukkan kualitas SDM petani nelayan masih cukup rendah.

Memperhatikan kondisi pertanian dalam arti luas tersebut diatas, maka kebijakan pembangunan pertanian mencakup : (a) pengembangan sumberdaya pertanian yang meliputi sumberdaya manusia, sumberdaya alam, ilmu pengetahuan dan teknologi, dana, informasi, dan kelembagaan; (b) peningkatan produksi usahatani, agroindustri, sistem distribusi dan perdagangan, pengembangan wilayah, pengentasan kemiskinan, dan optimalisasi investasi pertanian; (c) pengembangan manajemen pembangunan pertanian lintas sektoral dan lintas kabupaten/kota. Kebijakan pembangunan pertanian tersebut, dilaksanakan melalui : diversifikasi, intensifikasi, ekstensifikasi dan rehabilitasi. Diversifikasi pertanian diarahkan untuk dapat meningkatkan optimalisasi pemanfaatan sumberdaya dengan tetap memperhatikan kelestariannya, memperluas spektrum pembangunan pertanian dalam rangka pengembangan sistem agribisnis, dan pengembangan kawasan terpadu. Intensifikasi pertanian merupakan usaha peningkatan produktivitas input pertanian, meliputi tenaga kerja, modal, sumberdaya alam dan buatan, serta upaya peningkatan keunggulan daya saing dengan penerapan iptek dan sarana produksi yang efisien. Ekstensifikasi

dilakukan melalui peningkatan luas areal tanam maupun luas bidang usaha. Rehabilitasi sumberdaya pertanian diarahkan untuk memulihkan kemampuan produktif sumberdaya alam dan prasarana pertanian.

Adapun sasaran pembangunan pertanian, meliputi: (a) tercapainya optimalisasi pemanfaatan sumberdaya domestik berupa lahan, air, perairan, plasma nutfah, dan tenaga kerja; (b) meningkatnya spektrum sistem pembangunan pertanian; (c) meningkatnya penerapan rekayasa teknologi pertanian spesifik lokal dan tepat guna, baik dari lembaga penelitian pemerintah maupun swasta; (d) berkembangnya sistem agrobisnis dengan mengintegrasikan kegiatan hulu dan hilir untuk meningkatkan pengembangan pertanian yang berdaya saing tinggi.

Untuk mencapai sasaran pembangunan pertanian ditempuh program sebagai berikut :

a. Peningkatan Ketahanan Pangan.

Kegiatannya meliputi:

- 1) Pertanian tanaman pangan: (a) Penelitian dan pengembangan komoditas strategis yang berorientasi pasar; (b) Optimalisasi pemanfaatan lahan dan air untuk produksi pertanian, guna peningkatan produksi danantisipasi kekeringan atau banjir (c) Penanganan kekeringan, El Nino, dan ketahanan pangan; (d) Pengendalian hama dan organisme pengganggu tanaman, melalui: monitoring, peramalan, pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT), pengendalian hama terpadu (PHT), pengembangan agensia hayati; (e) Pengawasan

pemakaian pupuk dan pestisida; (f) Pengembangan perbenihan, melalui: perbanyak benih sumber, peningkatan sarana-prasarana perbenihan, pembinaan penangkar benih, perbaikan seleksi dan pemurnian benih, pengawasan dan sertifikasi benih; (g) Peningkatan produksi, melalui: aplikasi teknologi produksi pertanian, pengembangan komoditas pertanian pangan dan hortikultura pada kawasan pertanian terpadu, pengembangan tanaman pangan alternatif, pengembangan hutan-keluarga dengan basis tanaman pangan dan hortikultura; (h) Peningkatan sumberdaya manusia petani dan petugas, serta kelembagaan petani; (i) Pengembangan penanganan pasca panen; (j) Peningkatan kewaspadaan pangan dan panganekaragaman pangan; (k) Pengembangan sistem informasi pangan.

2) Perkebunan : (a) Penyusunan perwilayahan dan pengendalian lahan perkebunan lintas Kabupaten/Kota; (b) Pengembangan perkebunan rakyat; (c) Pengawasan perbenihan, pupuk, pestisida serta alat dan mesin (alsin); (d) Pengembangan sistem budidaya dan pengolahan hasil; (e) Penyediaan dukungan penyelenggaraan diklat teknis bagi petani dan petugas; (f) Penyediaan dukungan penyelenggaraan litbang; (g) Pelaksanaan kegiatan pemberantasan hama dan organisme pengganggu.

3) Peternakan : (a) Peningkatan pelaksanaan inseminasi buatan (IB) dan optimalisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) IB Sidomulyo, sebagai penghasil semen beku; (b) Peningkatan pengamanan ternak, melalui: peningkatan sarana-prasarana laboratorium kesehatan hewan, laboratorium kesehatan masyarakat veteriner, pos lalu lintas ternak, peningkatan kualitas petugas laboratorium,

dan rehab laboratorium kesehatan; (c) Revitalisasi taman ternak; (d) Pengembangan kawasan, melalui pengembangan peternakan terpadu;

- 4) Perikanan : (a) Penguatan kelembagaan Balai Benih Ikan Sentra (BBIS); (b) Pengembangan kolam rakyat dan optimalisasi pengelolaan perairan umum; (c) Pengembangan budidaya di kawasan pantai; (d) Peningkatan pemanfaatan teknologi terapan dan pengembangan teknologi pertambakan rakyat; (e) Peningkatan kualitas sumber daya manusia; (f) Pengembangan kawasan andalan.

b. Pengembangan Agrobisnis.

Kegiatannya meliputi:

- 1) Pertanian tanaman pangan : (a) Pengembangan model irigasi, berupa: model siraman dan pompanisasi; (b) Pengembangan laboratorium kultur jaringan, melalui: operasionalisasi Laboratorium kultur jaringan dan pengembangan Blok Fondasi tanaman induk; (c) Pengendalian OPT dengan agensi hayati, dan pengembangan pertanian organik; (d) Pengembangan wilayah pertanian terpadu pada kawasan desa-kota (DAS Kaligarang); (e) Pengembangan jaringan pemasaran hasil pertanian; (f) Pengembangan iptek pasca panen; (g) Pengembangan komoditas ekspor bernilai ekonomis, pengembangan kawasan agribisnis komoditas spesifik; (h) Peningkatan sumber daya manusia (petani); (i) Pengembangan promosi dan informasi pasar; (j) Pengembangan agribisnis pangan.
- 2) Perkebunan: (a) Pengembangan agribisnis perkebunan melalui pengembangan kawasan industri masyarakat

perkebunan (Kimbun); (b) Pengembangan sentra agroindustri; (c) Pengawasan perbenihan; (d) Pengembangan informasi pasar; (e) Peningkatan pengolahan hasil samping dan limbah; (f) Pengembangan kemitraan usaha; (g) Pengembangan wisata agro; (h) Pengembangan komoditas dan usahatani terpadu dalam rangka pengelolaan kawasan Sindoro Sumbing, DAS Progo dan Serayu.

3) Peternakan: (a) Peningkatan promosi produk hasil ternak; (b) Pengembangan kemitraan usaha; (c) Pemberdayaan peternak; (d) Peningkatan kualitas sumber daya manusia (peternak dan petugas); (e) Pengembangan teknologi bidang peternakan; (f) Pengembangan sarana prasarana pendukung kegiatan peternakan; (g) Pengembangan manajemen usaha tani on-farm dan off farm; (h) Pengembangan Sentra Pengembangan Agribisnis Komoditas Unggulan Sapi Limbah Hijauan (SPAKU-SALIH); (i) Pengembangan KSP Rembang-Blora dan Kebumen Purworejo.

4) Perikanan : (a) Peningkatan kemampuan pelayanan sarana dan prasarana perikanan; (b) Pengembangan usaha perikanan ; (c) Pengembangan sistem pengawasan dan pengendalian produksi; (d) Pengembangan kawasan terpadu Rawapening, Kawasan Bahari Terpadu Rembang.

2. Kehutanan.

Jawa Tengah dengan luas daratan 3.254.412 ha memiliki 640.526 Ha hutan negara, 104.592 Ha Taman Nasional Karimunjawa (Kep. Menteri Kehutanan RI No. 435/Kpts-II/1999 tanggal 15 Juni 1999) dan 204.056 Ha hutan rakyat yang tersebar di 28 Kabupaten. Berdasarkan fungsinya hutan negara terdiri

atas hutan produksi 561.637 Ha, hutan konservasi 3.375 Ha dan hutan lindung 75.514 Ha. Seluruh hutan negara dikelola oleh PT Perhutani Unit I Jawa Tengah. Produksi kayu bulat dari hutan negara pada tahun 1998 untuk jati sebesar 321.477 m³ dan untuk jenis rimba sebesar 322.670 m³. Sementara produksi non kayu dari hutan negara pada tahun 1998 berupa getah pinus 39.095 ton, kopal 168 ton dan daun kayu putih 8.257 ton. Potensi produksi hutan rakyat yang luasnya 6,27 % dari total luas hutan di Jawa Tengah pada tahun 2000 adalah 23.180.727 m³. Permasalahan pembangunan kehutanan, antara lain kurangnya ketersediaan bahan baku bagi industri perkayuan sekitar 1,7 juta m³ per tahun. Hal ini menyebabkan meningkatnya penebangan ilegal dan masuknya kayu ilegal dari luar Jawa. Selain itu masih terjadi proses marginalisasi masyarakat sekitar hutan, karena kegiatan pengelolaan hutan belum mampu meningkatkan kesejahteraan mereka.

Memperhatikan kondisi kehutanan diatas, maka kebijakan pembangunan kehutanan meliputi: (a) peningkatan kelestarian hutan untuk kepentingan keseimbangan tata air dan lingkungan hidup; (b) perluasan areal untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri, masyarakat dan ekspor; (c) peningkatan kegiatan penghijauan, rehabilitasi lahan kritis dan rehabilitasi hutan lindung; (d) penyerasian pemanfaatan kawasan hutan dengan pemanfaatan lainnya; (e) pemanfaatan hutan secara multifungsi baik untuk wisata alam maupun pemanfaatan flora/fauna; (f) peningkatan profesionalisme SDM, sarana dan prasarana pengelolaan hutan.

Sasaran pembangunan kehutanan yang ingin dicapai adalah : (a) tercapainya tertib administrasi batas-batas hutan dan tersusunnya rencana strategi kehutanan; (b) tercapainya kondisi

hutan yang aman untuk pengendalian banjir, erosi dan kekeringan; (c) terbangunnya sumberdaya hutan baru (hutan rakyat) di luar kawasan hutan negara; (d) meningkatnya perlindungan dan pengamanan hutan dari perambahan, penebangan liar, penjarahan dan kebakaran; (e) meningkatnya produktivitas hutan; (f) meningkatnya kesejahteraan masyarakat sekitar hutan; (g) meningkatnya pendapatan asli daerah (PAD) dari kehutanan; (h) membuka peluang usaha bagi masyarakat diluar kawasan hutan negara.

Untuk mencapai sasaran pembangunan kehutanan ditempuh program sebagai berikut :

a. Pemantapan Prakondisi Pengelolaan Hutan.

Kegiatannya meliputi : (a) Penyusunan rencana umum kehutanan Jawa Tengah; (b) Penyusunan pedoman inventarisasi dan pembuatan peta tematik hutan rakyat serta pedoman pengukuhan hutan negara; (c) Identifikasi dan inventarisasi kawasan hutan

b. Optimalisasi Pemanfaatan Hutan.

Kegiatannya meliputi : (a) Peningkatan peran aktif masyarakat dalam pengelolaan hutan; (b) Pengendalian tata usaha kayu dan peredaran hasil hutan; (c) Peningkatan fasilitasi dalam peningkatan kerjasama PT. Perhutani; (d) Pengembangan manfaat jasa-jasa hutan;

c. Rehabilitasi Hutan.

Kegiatannya meliputi : (a) Peningkatan pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan; (b) Peningkatan usaha kemitraan; (c) Pengendalian hama dan penyakit tanaman kehutanan.

d. Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam.

Kegiatannya meliputi : (a) Pengendalian peredaran kayu ilegal dan flora fauna yang tidak dilindungi; (b) Peningkatan peranserta masyarakat dalam perlindungan hutan dan konservasi alam; (c) Pengembangan usaha serta pelestarian flora dan fauna.

e. Pengembangan Kelembagaan.

Kegiatannya meliputi : (a) Peningkatan kinerja perencanaan, pengendalian dan pelayanan kehutanan; (b) Inventarisasi dan fasilitasi kelompok tani hutan rakyat; (c) Industrialisasi pengolahan kayu hutan rakyat; (d) Peningkatan sistem informasi manajemen kehutanan.

B. Perindustrian dan Perdagangan

Perkembangan Unit Usaha Industri di Jawa Tengah mengalami kenaikan dari 641.094 Unit Usaha pada tahun 1999 menjadi 642.271 Unit Usaha pada tahun 2000. Jumlah Investasi mengalami kenaikan dari Rp. 11.595.328 juta pada tahun 1999 menjadi Rp. 12.703.390 juta pada tahun 2000. Tenaga Kerja yang terserap sebanyak 2.526.678 orang pada tahun 1999 meningkat menjadi 2.541.422 orang pada tahun 2000. Untuk Nilai Produksi Industri sebesar Rp.19.635.594 juta pada tahun 1999 meningkat menjadi Rp.21.401.837 juta pada tahun 2000. Sedangkan Nilai Ekspor Non Migas juga mengalami kenaikan US \$. 1.665.303,90 pada tahun 1999 menjadi US \$. 1.854.686,90 pada tahun 2000.

Masalah yang dihadapi bidang Perindustrian dan Perdagangan saat ini adalah masih tidak berdayanya ekonomi nasional akibat krisis yang berkepanjangan, pembangunan industri saat ini masih belum sepenuhnya berbasis potensi unggulan daerah

dan masih banyak industri yang menggunakan bahan baku impor, keterkaitan antara industri besar – menengah – kecil masih kurang. Disamping itu belum sesuainya mutu produk daerah dengan standar ekspor serta belum terkoordinasinya jaringan informasi pasar.

Hal lain yang menjadi kendala adalah belum siapnya Industri Kecil dan Menengah dalam menghadapi persaingan global, karena penguasaan teknologi masih rendah dan masih tingginya biaya produksi serta ketergantungannya bahan baku impor. Disamping itu untuk komoditas andalan ekspor umumnya diekspor dalam bentuk bahan mentah atau barang setengah jadi sehingga nilai ekonominya relatif kecil.

Pembangunan industri dan perdagangan dimaksudkan untuk menjamin terselenggaranya kegiatan industri dalam memproduksi dan kegiatan perdagangan pada umumnya. Untuk itu kebijakan yang ditempuh antara lain: (a) Peningkatan kandungan lokal dan penggunaan produksi dalam negeri, dalam rangka penghematan devisa dan mendorong kemandirian; (b) Peningkatan keterpaduan antar lembaga pembina industri, dunia usaha dan masyarakat. (c) Pemanfaatan keunggulan komparatif dan penciptaan keunggulan kompetitif dalam rangka menghadapi persaingan global; (d) Pengembangan sumberdaya manusia secara intensif melalui transformasi teknologi; (e) Peningkatan promosi dagang dalam rangka memperluas pasar industri.

Sasaran yang ingin dicapai dalam bidang industri dan perdagangan adalah : (a) Tercukupinya kebutuhan pokok masyarakat dengan harga yang terjangkau melalui pengamanan distribusi; (b) Terwujudnya peran pengusaha kecil dan menengah serta perbaikan infrastruktur pasar; (c) Terciptanya kembali roda perekonomian melalui peningkatan dan pengembangan roda produksi dan distribusi serta terkendalinya inflasi; (d) Terwujudnya

pemberdayaan untuk penguatan agroindustri dan agrobisnis; (e) Terwujudnya pengembangan industri berorientasi ekspor.

Untuk mencapai sasaran pembangunan perindustrian dan perdagangan ditempuh program sebagai berikut :

1. Pemberdayaan dan Penataan Basis Produksi dan Distribusi

Kegiatannya meliputi : (a) Peningkatan ketrampilan teknologi, bantuan modal serta pengembangan Klaster Industri Kecil dan Menengah; (b) Peningkatan manajemen usaha dan mutu produk Agroindustri; (c) Penataan sistem informasi dan lembaga pembina; (d) Peningkatan sarana distribusi, pelayanan informasi pasar dan pemasyarakatan produk dalam negeri.

2. Perluasan dan Penguatan Lembaga Pendukung Pengembangan Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi.

Kegiatannya meliputi : (a) Pengembangan Pola Kemitraan Industri Kecil dan Menengah; (b) Peningkatan jiwa kewirausahaan; (c) Pembangunan Sarana Pemasaran Industri Kecil dan Menengah.

3. Pengembangan Ekspor.

Kegiatannya meliputi : (a) Peningkatan Mutu dan Pengembangan Produk Berorientasi Ekspor; (b) Peningkatan promosi produk untuk pasar Ekspor.

4. Penguatan Institusi Pendukung Pasar.

Kegiatannya meliputi : (a) Pengembangan sistem dan jaringan informasi pasar; (b) Peningkatan pelayanan bidang Kemetrolgian.

C. Penanaman Modal

Dalam rangka memulihkan kembali perekonomian yang masih terpuruk, peran pemerintah daerah dan dunia usaha serta masyarakat dalam menunjang kebutuhan pembiayaan pembangunan masih perlu ditingkatkan, karena pembiayaan pembangunan mempunyai multi manfaat, baik dalam rangka peningkatan pendapatan daerah untuk kemandirian daerah, maupun peningkatan sumber daya manusia.

Perkembangan perekonomian tahun 2000 belum pulih sepenuhnya, hal ini berakibat pada perkembangan investasi dan penyerapan tenaga kerja di Jawa Tengah. Perkembangan penanaman modal melalui Penanaman Modal Asing/Penanaman Modal Dalam Negeri (PMA/PMDN) pada tahun 1999 terdapat 98 proyek dan tahun 2000 turun menjadi 90 proyek atau minus 8 %. Dalam kurun waktu yang sama nilai investasi meningkat dari Rp 2,11 triliun menjadi Rp 3,05 triliun atau naik 45 %, penyerapan tenaga kerja 30.708 orang menjadi 35.771 orang atau naik 16 %. Di samping itu nilai ekspor meningkat dari US \$. 275,1 juta menjadi US \$ 596,9 juta atau naik 117 %, sedangkan investasi masyarakat dilihat dari perkembangan kredit investasi melalui perbankan juga mengalami peningkatan dari Rp. 1,44 triliun menjadi Rp. 3,13 triliun atau naik 117,36 %.

Sasaran yang ingin dicapai antara lain: (a) meningkatnya peran dunia usaha dalam pembangunan; (b) meningkatnya

promosi investasi di dalam dan luar negeri; (c) meningkatnya realisasi perijinan yang ada; (d) tercapainya kebutuhan investasi tahun 2002 dari swasta yang diprediksikan sebesar Rp. 4,2 trilyun.

Untuk mencapai sasaran pembangunan penanaman modal ditempuh program sebagai berikut :

a. Pengkajian dan Pengembangan Dunia Usaha.

Kegiatannya meliputi: (1) Pengembangan BUMD melalui penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah; (2) Inventarisasi dan pengkajian potensi-potensi investasi daerah; (3) Kajian rencana kebutuhan investasi.

b. Promosi Investasi.

Kegiatannya meliputi : (1) Pengembangan SIMPEDAL dan *home page* Jawa Tengah; (2) Mengikuti promosi investasi di dalam dan luar negeri; (3) Penyediaan sarana dan prasarana promosi investasi; (4) Pengembangan kerjasama dengan propinsi dan negara lain.

c. Pelayanan Perijinan Investasi.

Kegiatannya meliputi : (1) Penyederhanaan prosedur persetujuan penanaman modal; (2) Penyelenggaraan forum komunikasi; (3) Memfasilitasi upaya pemecahan masalah perijinan.

d. Pengendalian dan Pengawasan investasi.

Kegiatannya meliputi : (1) Memantau realisasi Surat Persetujuan Tetap (SPT) PMA dan PMDN; (2) Inventarisasi perkembangan investasi non fasilitas; (3) Sosialisasi standar *ecolabeling* bagi usaha PMA/PMDN.

D. Pertambangan dan Energi

1. Pertambangan

Potensi bahan galian golongan C di Jawa Tengah berdasarkan identifikasi dan inventarisasi 35 jenis hanya didapatkan 28 jenis. Dari 28 jenis bahan galian golongan C yang menjadi komoditas prospektif di Jawa Tengah berjumlah hanya 10 jenis yaitu pasir kuarsa, feldspar, bentonit, diorit, fosfat, marmer, batugamping, kaolin, ball clay dan trass.

Sedangkan potensi bahan galian golongan A dan B di Jawa Tengah teridentifikasi sebagai berikut : batubara, mangaan, belerang, barit, timah putih, timah hitam (galena), pasir besi, emas, pirit, chalcopyrite, gambut dan minyak bumi. Dari data air bawah tanah yang ada secara regional baru teridentifikasi sebanyak 21 cekungan dengan potensi 241.900.000 m³/tahun.

Jumlah perijinan untuk usaha pertambangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat sebanyak 8 buah kuasa pertambangan eksplorasi emas dan 8 buah kuasa pertambangan eksploitasi emas dan pasir besi. Pada tahun 2001 jumlah pengusaha pertambangan bahan galian golongan C untuk eksplorasi sebanyak 2 buah, sedangkan usaha pertambangan eksploitasi sebanyak 79 buah, serta pengolahan 7 Surat Ijin Pertambangan Daerah (SIPD). Untuk perijinan Air Bawah Tanah (SIP/SIPA) yang dikeluarkan Pemerintah Propinsi Jawa Tengah sebanyak 2.070 SIP serta 849 SIPA.

Pada tahun 1998 retribusi bahan galian golongan C dan air bawah tanah mencapai Rp 15,48 milyar atau 119 % dari target sebesar Rp 13 milyar. Pada tahun 1999 setelah ditangani oleh Kabupaten/Kota mengalami penurunan yaitu menjadi Rp 9,2 milyar. Sedangkan kontribusi bahan galian golongan C terhadap pembangunan Propinsi Jawa Tengah mencapai Rp 1.098,4 milyar

dengan prosentase 26,92 % pada sektor industri dan 73,08 % untuk sektor konstruksi.

Masalah yang dihadapi dan sulit diatasi adalah penambangan tanpa ijin, upaya mengkaitkan usaha antara pertambangan dengan kegiatan sektor lain belum efektif dilaksanakan, masih banyak lahan bekas pertambangan yang belum direklamasi dan dimanfaatkan, belum optimalnya pengawasan dan pengendalian dibidang pertambangan dan Air Bawah Tanah dan belum terpenuhinya sarana dan prasarana pertambangan yang memadai.

Pembangunan pertambangan dilakukan dengan mendorong dan menggerakkan partisipasi dunia usaha agar memanfaatkan potensi bahan tambang secara optimal, memberikan perluasan kesempatan kerja di bidang pertambangan dan meningkatkan bahan tambang menjadi bahan yang mempunyai nilai ekonomi lebih tinggi.

Kebijakan yang akan dilaksanakan antara lain: (a) pengelolaan potensi dan penataan wilayah pertambangan sebagai dukungan minat investasi dan pengelolaan yang optimal serta upaya menciptakan kondisi wilayah yang kompetitif; (b) pengawasan dan pengendalian untuk mencapai efisiensi dan produktifitas usaha pertambangan dan pengambilan air bawah tanah dalam rangka keseimbangan fungsi lingkungan; (c) peningkatan mekanisme pelayanan yang kondusif melalui pembinaan sistem usaha pertambangan dan mendorong keterlibatan peran serta masyarakat.

Sasaran yang ingin dicapai adalah: (a) terwujudnya pemberdayaan aparat Kabupaten/Kota khususnya di Bidang Pertambangan dalam rangka operasionalisasi pengawasan dan pengendalian usaha pertambangan dan air bawah tanah

didaerah; (b) berkembangnya usaha pertambangan sebesar 25 % pertahun dan terealisasinya pengusaha pertambangan berskala menengah dan besar yang saat ini masih dalam tahap eksplorasi untuk ditingkatkan menjadi tahap eksploitasi serta penganekaragaman bahan tambang menjadi barang setengah jadi, (c) teridentifikasinya seluruh potensi bahan galian vital dan strategi dengan skala cadangan tereka, (d) tercapainya pengembangan bahan galian yang berbasis pada ekonomi pedesaan dan terciptanya peran aktif masyarakat dalam kegiatan pengolahan bahan galian, (e) terciptanya pusat informasi dan laboratorium pertambangan secara berkesinambungan.

Untuk mencapai sasaran pembangunan pertambangan ditempuh program sebagai berikut:

a. Penelitian dan Pengembangan Potensi dan Teknologi Geologi, Pertambangan dan Air Bawah Tanah

Kegiatannya meliputi : (1) Peningkatan dan pengembangan potensi bahan tambang dan Air Bawah Tanah (ABT); (2) Bimbingan usaha pertambangan; (3) Pemberdayaan usaha pertambangan ; (4) Intensifikasi perhitungan produksi dan penetapan pajak bahan tambang dan ABT.

b. Penataan Wilayah dan Konservasi Lingkungan Geologi, Pertambangan dan Air Bawah Tanah

Kegiatannya meliputi : (1) Penataan dan pengembangan kawasan pertambangan; (2) Penyusunan pola cekungan dan pengaturan pengambilan Air Bawah Tanah.

c. Pengembangan Investasi Usaha Pertambangan

Kegiatannya meliputi : (1) Peningkatan promosi; (2) Pengembangan sistem pelayanan perijinan pertambangan

d. Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pengawasan dan Pengendalian Geologi, Pertambangan dan Air Bawah Tanah

Kegiatannya meliputi : (1) Pelaksanakan pemantauan dan pengendalian pertambangan; (2) Penertiban dan pengendalian kegiatan pengambilan ABT; (3) Pemantauan dan pengendalian gerakan tanah.

e. Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana Geologi, Pertambangan dan Air Bawah Tanah

Kegiatannya meliputi : Pengembangan pusat informasi dan sarana di bidang geologi, pertambangan dan ABT.

2. Energi

Di Jawa Tengah pada tahun 2000 potensi pembangkitan tenaga listrik terpasang 39 unit tersebar di 17 lokasi dengan total daya sebesar 1.694,32 MW. Jumlah desa berlistrik sampai bulan September 2000 mencapai 98,65 %, jumlah pelanggan listrik sebanyak 3.644.485 pelanggan dengan Rasio elektrifikasi sebesar 58,19 %.

Gardu Distribusi yang terdapat di Jawa Tengah sebanyak 3.185 buah dengan jumlah trafo terpasang sebanyak 65.367 buah. Panjang jaringan tegangan menengah 31.105 KMs, panjang jaringan tegangan rendah 33.931 KMs. Sedangkan pemanfaatan energi alternatif di Jawa Tengah terdiri dari Pembangkit Listrik Tenaga Surya tersebar di 20 Kabupaten, Pembangkit Listrik Tenaga Diesel terdapat di Kabupaten Cilacap dan Jepara, Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro di Kabupaten Wonosobo dan Pekalongan (keadaannya rusak) serta Pembangkit Listrik Tenaga Bayu di Kabupaten Jepara.

Masalah yang dihadapi adalah kondisi geografis desa-desa yang belum berlistrik semakin sulit untuk dijangkau jaringan listrik

dan terkadang harus melewati kawasan hutan/perkebunan. Investasi di sektor energi semakin memerlukan biaya tinggi, sedangkan dana yang tersedia terbatas. Disamping itu masalah kewenangan disektor energi sebagian besar masih ditangani Pemerintah Pusat, sehingga pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan sepenuhnya masih mengacu pada Pemerintah Pusat.

Kebijakan yang akan dilaksanakan antara lain : (a) penyediaan, pemanfaatan, pemasaran dan penjualan energi, (b) peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penguasaan teknologi, (c) peningkatan, penyediaan energi dari berbagai sumber.

Sasaran yang ingin dicapai adalah : (a) terinventarisasinya kebutuhan energi untuk masyarakat dan industri, (b) terinventarisasinya kebutuhan energi alternatif untuk masyarakat pedesaan, (c) terinventarisasinya energi untuk penunjang usaha minyak dan gas.

Untuk mencapai sasaran pembangunan energi ditempuh program sebagai berikut :

a. Pengembangan Listrik Pedesaan

Kegiatannya meliputi : Inventarisasi listrik pedesaan.

b. Pengembangan Energi Alternatif

Kegiatannya meliputi : Inventarisasi energi alternatif.

c. Pengembangan Jasa Penunjang Migas

Kegiatannya meliputi : Inventarisasi jasa usaha penunjang migas.

E. Pariwisata.

Perkembangan kepariwisataan di Jawa Tengah tidak terlepas dari kondisi nasional maupun regional yang ada, diantaranya adalah menurunnya daya beli masyarakat, dan yang paling utama adalah kondisi sosial politik dan keamanan yang belum stabil. Hal tersebut merupakan kondisi eksternal yang merupakan masalah umum yang mempengaruhi perkembangan pariwisata di Jawa Tengah.

Perkembangan pariwisata Jawa Tengah juga tidak terlepas dari perkembangan kepariwisataan internasional. Kualitas pelayanan jasa dan atraksi yang semakin baik di tingkat internasional telah menyebabkan semakin beratnya kompetisi yang harus dihadapi oleh Jawa Tengah dalam memasarkan produk kepariwisataannya. Hal lain yang menyebabkan Jawa Tengah sulit bersaing secara internasional disebabkan kurangnya promosi, sehingga produk pariwisata belum banyak dikenal masyarakat internasional. Hal yang sama dialami di tingkat nasional. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada tahun 1998 hanya memiliki porsi sebesar 2 %, jauh dibawah Bali (39 %), Jakarta (26 %), dan Yogyakarta (4 %). Saat ini masih terjadi pula penurunan jumlah wisman, yaitu sebesar 3,39 % pada tahun 2000. Selain itu, lama tinggal wisatawan di Jawa Tengah (1,55 hari) relatif masih tertinggal oleh Propinsi lain seperti Bali (4,61 hari), Yogya (2,45) hari, bahkan Lampung (1,70 hari). Hal ini selain disebabkan oleh belum kuatnya jejaring antar pelaku (*stakeholders*), juga disebabkan oleh masih rendahnya kualitas jasa dan atraksi yang ditawarkan. Hal-hal tersebut telah menyebabkan kinerja kepariwisataan Jawa Tengah belum sepenuhnya sebagaimana diharapkan, yang antara lain dapat ditandai dengan beberapa kenyataan berikut : (a) belum pulihnya

kunjungan wisatawan ke Jawa Tengah. Pada tahun 1997-1998 jumlah kunjungan menurun sebesar 18,17%, sedangkan pada tahun 1998-1999 meningkat sebesar 13,04%. Walaupun terjadi peningkatan pada tahun 1998-1999, jumlah kunjungan wisatawan asing (yang juga sekaligus mencerminkan tingkat kemampuan kompetisi global) masih menurun sebesar 19,97 %. Bahkan untuk tahun 2000 masih turun sekitar 3,39 % dengan rata-rata lama tinggal dibawah 2 hari. Hal ini antara lain dipengaruhi oleh belum optimalnya promosi yang dilakukan sehingga Jawa Tengah belum banyak dikenal di negara lain; (b) walaupun memiliki potensi wisata unggulan dan fasilitas pendukung yang memadai (jenis obyek wisata alam, budaya dan buatan sekitar 213 obyek, serta fasilitas akomodasi 89 hotel berbintang dengan jumlah kamar 5129 dan 832 hotel melati dengan jumlah kamar 15.665 ditambah infrastruktur dan aksesibilitas lainnya), Jawa Tengah belum mampu menjadikan dirinya sebagai daerah tujuan wisata utama di tingkat nasional. Bahkan belum banyak masyarakat asing mengetahui potensi pariwisata di Jawa Tengah. Ini berarti bahwa produk wisata di Jawa Tengah masih banyak yang belum dapat dipasarkan sebagai produk unggulan (*market driven*); (c) belum optimalnya jejaring (*network*) yang terbentuk antar pelaku (*stakeholders*), antar sektor dan antar wilayah. Ini semua menyebabkan kurang efektifnya pengembangan kepariwisataan daerah; (d) sumbangan sektor pariwisata terhadap PDRB maupun PAD Jawa Tengah masih relatif kecil, yakni 6,71 % terhadap PDRB dan 7,65 % terhadap PAD pada tahun 1999; (e) kualitas sumber daya manusia di bidang pariwisata masih relatif rendah, semangat kompetisi dan kewirausahaan dari para *stakeholders* masih belum kuat.

Kebijakan pembangunan pariwisata diarahkan untuk mengatasi berbagai permasalahan pariwisata yang ada di daerah, sekaligus untuk mengantisipasi datangnya persaingan bebas di era

globalisasi, diantaranya : (a) membangun jaringan pemasaran dan promosi maupun jaringan informasi dan komunikasi secara terpadu; (b) menumbuhkembangkan potensi kepariwisataan melalui potensi budaya dan alam yang dimiliki sebagai daya tarik unggulan; (c) membentuk daya sinergi antar *stakeholders* untuk mendorong tumbuhnya iklim investasi yang kondusif; (d) mempersiapkan tersedianya tenaga kerja bidang pariwisata yang lebih profesional guna peningkatan daya saing.

Sasaran pengembangan pariwisata adalah : (a) berkembangnya promosi dan sistem informasi dan pariwisata dalam negeri dan luar negeri secara terintegrasi; (b) meningkatnya kualitas obyek dan daya tarik wisata andalan dan unggulan sesuai dengan pasar yang dituju; (c) meningkatnya kualitas produk wisata yang mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional; (d) meningkatnya kerjasama terpadu antar wilayah, antar sektor dan antar pelaku pariwisata dalam pembangunan pariwisata; (e) meningkatnya kualitas pelayanan sesuai dengan standar kompetensi yang berlaku dan kualitas sumber daya manusia untuk tujuan profesionalisme.

Untuk mencapai sasaran pembangunan pariwisata ditempuh program sebagai berikut :

1. Promosi Pariwisata

Kegiatannya adalah (a) Pengkajian pasar wisata dan kerjasama pengembangan pariwisata melalui penyusunan profil wisatawan mancanegara, analisa pasar wisata budaya, wisata bahari, wisata minat khusus; (b) Pengembangan promosi pariwisata melalui pengadaan bahan promosi dan informasi, promosi lewat media cetak dan elektronik, pengadaan bahan peragaan promosi lewat Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI), serta persiapan Festival Borobudur

2003; (c) Penyelenggaraan *event* dan informasi produk wisata melalui penyelenggaraan pameran, *fam tour*, dan peningkatan pelayanan informasi, dan *pers release*.

2. Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata

Kegiatannya meliputi : (a) Perencanaan Pariwisata Jawa Tengah melalui penyusunan *software data base* pariwisata dan data statistik pariwisata Jateng 2002, pengembangan forum perencanaan pariwisata, serta peningkatan hubungan antar lembaga; (b) Penyuluhan pariwisata melalui pelatihan tenaga kerja, usaha jasa pariwisata, penyuluhan sadar wisata dan kuis sadar wisata, pembinaan pramuwisata dan fasilitasi duta wisata.

3. Pengembangan Produk Pariwisata

Kegiatannya meliputi : (a) Pengembangan produk wisata melalui pengembangan kawasan pariwisata Karimunjawa, Rawa Pening, Pulau Nusakambangan dan taman wisata purbakala Sangiran; (b) Peningkatan sarana wisata melalui pembinaan dan pengawasan pariwisata, klasifikasi dan penyusunan standar kompetensi hotel, inventarisasi dan identifikasi potensi usaha pariwisata serta pengadaan rambu-rambu wisata di Jawa Tengah; (c) Pengembangan daya tarik dan atraksi wisata melalui pemberdayaan khasanah seni kriya, pengemasan paket wisata bersama stakeholders, dan fasilitasi obyek dan atraksi wisata.

F. Perhubungan dan Pekerjaan Umum.

1. Perhubungan.

Perhubungan sesuai dengan media yang dilaluinya, dikelompokkan menjadi Perhubungan Darat, Laut, Udara, Pos dan Telekomunikasi. Untuk Perhubungan Darat sendiri terdiri dari Transportasi Jalan Raya, Rel serta Sungai, Danau dan Penyeberangan. Dari berbagai fasilitas perhubungan yang terdiri dari sarana dan prasarana tersebut di atas, angkutan jalan rayalah yang menuntut perhatian paling besar. Hal ini disebabkan oleh tidak seimbangnya tingkat volume kendaraan dengan tingkat pertumbuhan volume/kapasitas jalan. Kebutuhan sarana perhubungan selain merupakan kebutuhan dasar bagi masyarakat juga merupakan kebutuhan dasar ekonomi.

Panjang jalan di Propinsi Jawa Tengah mencapai sekitar 23.700 km, dengan perincian: 1.215 km jalan Nasional, 2.589 km jalan Propinsi dan 19.817 km jalan Kabupaten / Kota. Guna mencapai kelaikan jalan yang optimal telah disediakan 35 unit pengujian kendaraan bermotor yang tersebar di seluruh Kabupaten / Kota, dan sesuai Surat Keputusan Gubernur Propinsi Jawa Tengah No. 550.2/0179 tanggal 25 Mei 1997 tentang penataan kembali Jembatan Timbang – maka telah dibuka kembali 17 Jembatan Timbang yang ada di Jawa Tengah dan telah ditetapkan Perda No. 4 Tahun 2001 tentang Tertib Pemanfaatan Jalan dan Pengendalian Kelebihan Muatan.

Sementara itu kondisi angkutan umum menunjukkan kualitas pelayanan yang diberikan masih rendah, belum memuaskan dan masih dalam taraf yang memprihatinkan. Selanjutnya dalam penyediaan public goods seperti pelayanan angkutan umum, peranan manajemen dan pendayagunaan sumberdaya sangat diperlukan.

Angkutan umum yang saat ini diupayakan penyelenggaraannya merupakan angkutan yang dapat dijangkau oleh masyarakat luas dan banyak (massal), hal ini mengakibatkan permintaan akan jasa kereta api melonjak. Penyediaan tambahan kereta api penumpang jarak pendek jurusan Semarang – Cirebon yang semula melintasi rute Semarang – Tegal sangat banyak membantu para pengguna jasa transportasi, khususnya para penglajo (*commuter*). Hal ini perlu ditunjang dengan penambahan beberapa spoor emplasemen pada beberapa stasiun dan peningkatan prasarana jalan rel yang secara bertahap dapat menjadi jalur ganda (*double track*) lintas Surabaya – Jakarta. Sedangkan untuk mengurangi beban lalu lintas di wilayah tengah perlu ditingkatkan jalan dan jembatan kereta api lintas Semarang – Solo dengan penggantian bantalan beton dan rel dengan R 54.

Kondisi angkutan penyeberangan saat ini masih perlu diberdayakan, utamanya penyeberangan Jepara – Karimunjawa. Prasarana dermaga penyeberangan sudah memadai, namun sarana (kapal) penyeberangan yang ada masih perlu ditingkatkan dan ditambah armadanya. Hal ini selain digunakan sebagai angkutan perintis, juga diharapkan dapat meningkatkan kunjungan wisatawan. Sementara untuk lintas Cilacap – Majingklak – Kalipucang perlu segera dilaksanakan pengerukan alur pelayarannya, dan untuk angkutan penyeberangan yang berada di waduk-waduk yang saat ini masih dikelola oleh UPT Dep. Perhubungan perlu ditingkatkan sarana dan prasarana fasilitas keselamatannya.

Pelabuhan Tanjung Emas Semarang adalah salah satu Pelabuhan yang terbuka untuk perdagangan luar negeri, telah tumbuh dan berkembang serta berperan dalam menunjang kegiatan ekonomi nasional khususnya Jawa Tengah. Namun

untuk pelayanan angkutan penumpang saat ini terminal yang ada masih menjadi satu dengan terminal barang (*cargo*), sementara jumlah penumpang kapal semakin meningkat setiap tahun, sehingga perlu peningkatan prasarana terminal terpadu angkutan penumpang kapal dengan moda angkutan transportasi darat yang dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas pelayanan yang memadai. Sedangkan Pelabuhan Tanjung Intan – Cilacap, merupakan outlet Jawa Tengah bagian selatan yang dikembangkan menjadi pelabuhan utama sekunder. Selain sarana prasarana pelabuhan yang dimiliki cukup memadai (5 buah dermaga serbaguna termasuk dermaga untuk semen dan pupuk, jetty untuk kapal kecil, angkutan laut dan terminal ferry untuk penumpang, karantina hewan hidup), beberapa hal yang mendukung untuk menarik investasi dalam bidang industri, manufaktur dan pertanian yaitu : adanya pelabuhan alam, sarana transportasi yang baik (jalan raya, jalan kereta api), keamanan yang mantap, infrastruktur penunjang yang memadai, aktifitas dan pertumbuhan yang tinggi. Pertamina mempergunakan pelabuhan untuk impor minyak tanah dan ekspor hasil pengolahan sedangkan PT. Semen Nusantara membongkar batubara dan bahan baku untuk pabrik semen yang terdapat di hulu S. Donan. Untuk pelabuhan-pelabuhan niaga lainnya yang berada di daerah pantura, seperti Pelabuhan Tegal, Juwana, Brebes, Rembang serta pelabuhan-pelabuhan kecil lainnya selain dipergunakan untuk angkutan barang antar pulau juga sebagai persinggahan kapal-kapal nelayan. Hal ini memerlukan peningkatan fasilitas keselamatan pelayaran berupa sarana Bantu navigasi pelayaran dan pengerukan alur pelayaran. Sedangkan untuk Pelabuhan Legon Bajak di Karimunjawa masih perlu ditingkatkan fasilitas prasarananya.

Bandar Udara Achmad Yani Semarang saat ini melayani jalur penerbangan domestik, dengan panjang runway 1.850 x 45 m diharapkan dapat ditingkatkan menjadi 2.250 x 45 sehingga dapat didarati pesawat jenis B-737 penuh dan dapat melayani penerbangan dengan skala internasional. Hal ini perlu ditunjang dengan fasilitas sarana dan prasarana penunjang yang memadai, serta penambahan rute penerbangan. Bandar Udara Adisumarmo Surakarta saat ini melayani jalur penerbangan internasional, selain melayani penerbangan haji dengan fasilitas asrama haji Donohudan – dapat pula melakukan pemberangkatan TKI dan sejak awal tahun 2000 dapat pula melakukan pelayanan keimigrasian di bandara. Sedangkan Bandar Udara Tunggul Wulung Cilacap saat ini selain melayani *air traffic* – sedang dalam proses untuk pemulihan penerbangan kembali oleh PT. Merpati Nusantara. Bandar Udara Dewadaru Karimunjawa – karena subsidi dihentikan sejak Maret 1998, maka selain melayani *air traffic* juga melayani penerbangan *charter*.

Tugas Pemerintahan di bidang Pos dan Telekomunikasi merupakan bagian terpisah dari tugas perusahaan yang dikelola oleh PT. Pos Indonesia dan PT. Telekomunikasi Indonesia. Tugas pemerintah adalah pembinaan, dimana aspek pembinaan filateli diarahkan pada peran aktif masyarakat dalam penggunaan pelayanan jasa pos disamping penertiban frekuensi radio di daerah.

Berdasarkan permasalahan tersebut diatas, kebijakan yang akan ditempuh adalah: (a) pengembangan Sistem Jaringan Transportasi melalui penataan simpul-simpul transportasi; (b) pengembangan terminal angkutan penumpang terpadu di Tanjung Emas Semarang; (c) pembangunan jalan Tol dan Jalan Rel Semarang-Solo; (d) peningkatan koordinasi antar asosiasi pengguna jalan dengan Dinas/Instansi terkait; (e) penyerasian

jaringan jalan dari sentra produksi ke pasar; (f) penyeserasian moda angkutan; (g) pengembangan pariwisata; (h) pengembangan perekonomian antar wilayah, meningkatkan PAD; (i) peningkatan peran swasta dan masyarakat dalam pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi; (j) peningkatan pengawasan / pember-dayaan hukum di sektor transportasi; (k) peningkatan keamanan, keselamatan, dan ketertiban penyelenggara-an transportasi.

Sasaran yang akan dicapai dalam pembangunan Transportasi, yaitu : (a) terwujudnya jaringan transportasi sebagai serangkaian simpul transportasi dan / atau ruang kegiatan yang dihubungkan oleh ruang lalu lintas sehingga terbentuk satu kesatuan sistem jaringan untuk keperluan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan. Jaringan Transportasi ini diwujudkan dengan menetapkan Rencana Umum Jaringan Transportasi; (b) terwujudnya pembangunan terminal penumpang terpadu di Tanjung Emas Semarang; (c) terpeliharanya jalan dan jembatan; (d) berkembangnya sistem angkutan umum massal; (e) meningkatnya sarana dan prasarana angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan, terutama dalam perbaikan mutu pelayanan dan keseimbangan supply – demand; (f) meningkatnya pemeliharaan dan rehabilitasi Bandar udara, terutama dalam perbaikan mutu pelayanan dan fasilitas keselamatan penerbangan serta penambahan rute dan operator penerbangan; (g) meningkatnya pemeliharaan dan rehabilitasi pelabuhan laut/samudera, terutama dalam perbaikan mutu pelayanan, fasilitas keselamatan pelayaran dan keseimbangan supply – demand; (h) berkembangnya pos dan telekomunikasi, terutama dengan adanya perbaikan mutu pelayanan dan keseimbangan supply - demand.

Untuk mencapai sasaran pembangunan perhubungan ditempuh program sebagai berikut :

a. Pengembangan Perhubungan Darat.

Kegiatannya meliputi : (1) Pengembangan Sistem Jaringan Transportasi Darat melalui; (a) Penyusunan Rencana Umum Jaringan Transportasi Jalan Jawa Tengah; (b) Penyusunan Data Angkutan Bus (AKAP dan AKDP), serta Angkutan Truk; (c) Pengendalian Simpul Transportasi Angkutan Jalan (Terminal Bus dan Area Parkir Truk); (2) Pengembangan Fasilitas keselamatan Lalu Lintas Jalan, melalui; (a) Pengadaan Peralatan Komputer On Line untuk peningkatan Kinerja Jembatan Timbang dan Sistem Informasi Manajemen Angkutan; (b) Peningkatan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor; (c) Pengadaan Kendaraan Operasional dan Mobil Derek; (d) Peningkatan Fasilitas Jembatan Timbang; (e) Relokasi Jembatan Timbang ;(f) Pengadaan Rambu, Marka dan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas Jalan; (g) Peningkatan koordinasi antara pengguna jalan dengan dinas/instansi terkait; (3) Pengendalian Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru.

b. Pengembangan Perhubungan Laut.

Kegiatannya meliputi : (1) Pengembangan Fasilitas pelabuhan laut; (2) Pengembangan Fasilitas Keselamatan Pelayaran dan keamanan perairan.

c. Pengembangan Perhubungan Udara.

Kegiatannya meliputi : (1) Pengembangan fasilitas keselamatan penerbangan; (2) Penambahan rute penerbangan.

d. Pengembangan Bidang Pos dan Telekomunikasi.

Kegiatannya meliputi: (1) Peningkatan Pengendalian Frekuensi.

e. Penelitian dan Pengembangan Perhubungan.

Kegiatannya meliputi : (1) Pengkajian sistem jaringan transportasi di Jawa Tengah : (a) Penyusunan profil perhubungan; (b) Penyusunan rencana umum jaringan transportasi angkutan air, Kereta Api dan Udara; (2) Pengkajian manajemen dan rekayasa transportasi melalui : Perencanaan kawasan terpadu prasarana penumpang angkutan penyeberangan, rel dan jalan di Semarang; (3) Pengembangan sistem angkutan umum masal jalan rel antar kota yang efisien, nyaman, aman dan terjangkau melalui : Penyusunan perencanaan peningkatan fungsi jalur kereta api Semarang-Solo-batas DIY; (4) Pengkajian keselamatan transportasi melalui : Penyusunan kondisi dan unjuk kerja sarana Bantu navigasi pelayaran di Pantai Jawa Tengah Selatan; (5) Penyusunan perencanaan optimalisasi pengembangan dan pembangunan radio base station di Jawa Tengah.

2. Pengairan.

Potensi sumber daya air di Jawa Tengah sebanyak 65.733,75 juta m³ yang termanfaatkan sebesar 25.282,16 juta m³ ($\pm 41,97$ %) dan yang tidak termanfaatkan sebanyak $\pm 38.143,21$ juta m³ ($\pm 58,03$ %) berupa banjir dan terbuang ke laut. Melihat potensi air tersebut, apalagi kalau diingat bahwa keberadaan air tidak dijumpai pada sepanjang tahun dan pada setiap tempat/lokasi, maka diperlukan suatu pengelolaan air dan sumber air yang terpadu dan berkelanjutan. Prasarana dan sarana

pengairan yang dikelola sesuai kewenangan bidang pengairan adalah : (a) sungai 1.321 buah sepanjang $\pm 15.052,70$ km dengan tanggul banjir sepanjang ± 1.129 km; (b) waduk besar, waduk alam, waduk kecil sebanyak 39 buah; (c) embung atau waduk lapangan sebanyak 172 buah; (d) bendung sebanyak 5.437 buah terdiri dari berbagai tipe; (e) jaringan irigasi yang terdiri dari bangunan irigasi sebanyak 1.273 buah dan saluran irigasi induk/primer sepanjang 580,36 km, saluran sekunder sepanjang 475,76 km, saluran pembuang sepanjang 22,53 km; (f) prasarana penunjang pengelolaan pengairan yang mendukung penyediaan data sumber daya air meliputi jaringan stasiun hidroklimatologi dan fasilitas peralatan telekomunikasi.

Bencana alam banjir dan tanah longsor di beberapa daerah di Jawa Tengah akhir-akhir ini dirasakan cenderung meningkat, penyebab bencana tersebut bermula dari kondisi alam sendiri maupun karena aktivitas manusia, seperti berkurangnya lahan sebagai daerah resapan air dan menurunnya daya dukung lingkungan terhadap kelestarian fungsi dan manfaat sumber daya air akibat perilaku perusakan hutan di daerah hulu yang kurang terkendali, kurang terpeliharanya bangunan pengendali banjir dan alur sungai, pengendapan sedimen pada sungai, sistem jaringan drainase yang tidak berjalan baik, serta curah hujan yang melebihi batas normal, sehingga mengakibatkan kerugian jiwa, ekonomi, sosial dan lingkungan. Kondisi pengairan di Jawa Tengah cukup memprihatinkan akibat bencana alam tersebut dengan gambaran sebagai berikut : (a) kondisi tanggul sungai yang dadal dan limpas status sampai dengan 2 Pebruari 2001 terdapat di 185 lokasi; (b) jaringan irigasi pada 13 Kabupaten mengalami gangguan layanan irigasi di lahan sawah seluas ± 53.615 Ha.

Untuk mengatasi permasalahan banjir, perlu beberapa alternatif pengendalian banjir yang dapat digunakan sebagai kebijakan pemerintah, yaitu pengendalian dengan bangunan (pembuatan bendungan), kolam penampungan, tanggul penahan banjir, saluran pengelak aliran banjir, pengerukan drainase, pengendalian banjir dengan pengaturan dan pengendalian banjir dengan eksploitasi dan pemeliharaan sungai secara rutin. Mengingat hal tersebut, langkah yang perlu dilakukan adalah pertama, dengan meningkatkan peran serta masyarakat/penerima manfaat dalam pengelolaan air dan sumber-sumber air melalui swadaya sehingga secara bertahap dapat mengurangi beban Pemerintah. Kedua, dengan membentuk Institusi Pengelola yang diberi kewenangan mengelola air dan sumber air serta prasarana pengairan.

Dalam pengelolaan sumber daya air permasalahan utama yang dihadapi adalah mengenai penebangan hutan yang tanpa memperhatikan daya dukung lingkungan sehingga mengakibatkan menurunnya vegetasi hutan dan fungsi hidrologis serta erosi yang tinggi di daerah aliran sungai. Hal tersebut akan berdampak pada meningkatnya aliran permukaan dan menurunnya air yang meresap ke dalam tanah, sehingga timbul bencana banjir maupun kekeringan.

Dengan berlakunya otonomi daerah akan berimplikasi diserahkannya sebagian urusan jaringan irigasi pengairan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Propinsi hanya menangani jaringan irigasi pengairan yang sifatnya lintas Kabupaten/Kota, termasuk juga pengelolaan air baku yang membutuhkan kesepakatan bersama mengenai kriteria dan tanggung jawab pengelolaannya yang mencakup kegiatan pembangunan, perbaikan, operasi dan pemeliharaan waduk,

embung dan jaringan air baku untuk keperluan penyediaan air baku bagi industri, permukiman dan perkotaan.

Untuk terselenggaranya pengelolaan sumber daya air yang dapat memberikan manfaat bagi kepentingan di segala bidang kehidupan dan penghidupan, maka penanganannya didasarkan atas Satuan Wilayah Sungai (SWS) dengan keterpaduan semua pihak terkait. Dalam melaksanakan penanganan jaringan irigasi secara menyeluruh perlu adanya pendefinisian kembali peran dan tugas-tugas Pemerintah Pusat, Propinsi dan Kabupaten/Kota, sebagai pedoman bagi Pemerintah dalam menyiapkan sumber daya manusia, dana dan kelembagaannya.

Keberhasilan pengelolaan yang berkelanjutan memerlukan dukungan semua pihak. Dalam pemberdayaan kelembagaan pengelolaan sumber daya air dilakukan melalui pendekatan peran serta semua pihak yang terkait termasuk pengguna air merupakan salah satu prasyarat dalam upaya menciptakan iklim keterpaduan, kebersamaan, keterbukaan dalam pengelolaan sumber daya air. Dalam hal ini diperlukan lembaga yang mengkoordinasi kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya air, seperti Panitia Tata Pengaturan Air Propinsi dan Panitia Pelaksana Tata Pengaturan Air pada Wilayah Sungai.

Dalam rangka terwujudnya pendayagunaan sumber daya air secara optimal, maka kebijakan pembangunan pengairan mencakup: (a) peningkatan upaya pengembangan dan konservasi sumber daya air guna mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah; (b) perlindungan kawasan strategis dan sumber-sumber produksi pertanian dari bahaya bencana banjir; (c) peningkatan pelayanan jaringan irigasi dan tata air dalam rangka mendukung sektor pertanian dalam arti luas dan

mendorong industri yang menggunakan bahan baku lokal (resourced based) dan ekspor.

Adapun sasaran pembangunan pengairan, meliputi: (a) tersedianya data hidrologis dan data kualitas air; (b) tersedianya air baku ; (c) berfungsinya bangunan pengairan dan terjaganya areal sawah/ permukiman/sarana ekonomi dari bencana banjir; (d) teratasinya konflik antar kepentingan dan optimalnya pengelolaan sumber daya air.

Untuk mencapai sasaran pembangunan pengairan ditempuh program sebagai berikut :

a. Pengembangan Dan Konservasi Sumber Air

Kegiatan pengembangan data dasar perencanaan meliputi pengumpulan dan analisa data hidrologi, pemasangan penakar hujan type OBS, rehabilitasi pos hidrologi, pembangunan Pos Duga Air Biasa (PDAB), analisa kualitas air dan analisa potensi sumber air Daerah Pengaliran Sungai (DPS).

b. Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku

Kegiatan pengembangan air tanah meliputi pembuatan sumur dangkal.

c. Pengelolaan Sungai, Danau dan Sumber Air Lainnya

Kegiatan perbaikan sungai, muara, danau dan pantai meliputi pengamanan pantai, perkuatan tebing, pembuatan tanggul, normalisasi alur, pembuatan chek dam, perbaikan tanggul, pengerukan muara, rehabilitasi waduk dan pengadaan alat berat.

d. Pengembangan Pengelolaan Jaringan Irigasi

Kegiatannya mencakup : (1) Penelitian dan pengendalian operasi dan pemeliharaan pengairan meliputi studi

peningkatan efisiensi pengoperasian Waduk Kedung Ombo dalam pengendalian banjir dan kekeringan, pengembangan sistem informasi pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan, studi pengembangan sumber daya air Daerah Pengaliran Sungai Pemali, pengkajian kinerja saluran drainase Daerah Irigasi. Colo Timur, kaji ulang pedoman O & P Waduk Cengklik, kajian pengelolaan sumber daya air Kali Gelis, dan pengkajian operasi Bendung Klambu dan saluran induk Klambu kanan; (2) Penanggulangan dan perbaikan jaringan irigasi akibat bencana alam meliputi perbaikan kerusakan jaringan irigasi akibat bencana alam, dengan melakukan perbaikan bendung, bangunan air, saluran irigasi dan penyediaan bahan banjiran (karung plastik dan kawat bronjong); (3) Operasi dan pemeliharaan pengairan Balai Pengelolaan Sumber Daya Air meliputi pemeliharaan waduk, pemeliharaan bendung, pemeliharaan bangunan air, pemeliharaan saluran dan pemeliharaan sungai; (4) Perbaikan dan peningkatan pengairan meliputi desain jaringan irigasi, rehabilitasi jaringan irigasi, rehabilitasi bendung, pembuatan *ground sill* dan pembuatan talang; (5) Normalisasi saluran irigasi tambak meliputi perbaikan dan normalisasi saluran irigasi tambak untuk areal tambak; (6) Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dalam Pengelolaan Irigasi meliputi operasionalisasi kelompok kerja Pembaharuan Kebijakan Pengelolaan Irigasi (PKPI) Tingkat Propinsi, operasionalisasi Tim Pemberdayaan Tingkat Kabupaten dan implementasi PKPI.

G. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Para perumus kebijakan dan strategi pembangunan menyadari bahwa peranan Iptek dalam pembangunan sangat besar. Dalam proses pembangunan, perhatian penting adalah pada tingkat daya serap dan daya terap perkembangan Iptek sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan masyarakat (teknologi tepat guna). Oleh karena itu dalam pembangunan Iptek dituntut adanya kemampuan memilih Iptek secara tepat dan merupakan usaha yang sistematis untuk percepatan laju pembangunan.

Permasalahan pembangunan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi antara lain kegiatan penelitian dan pengembangan serta rekayasa teknologis belum sepenuhnya dirancang secara sistematis untuk mendukung pembangunan. Hasil-hasil penelitian dan kebutuhan pengguna belum sinergis. Pengembangan dan rekayasa teknologi belum terkoordinasikan dalam satu kesatuan sistem. Disamping itu data dan informasi, iklim yang mendorong kegiatan penelitian, sarana dan prasarana, dan SDM peneliti belum memadai.

Untuk mengatasi hal-hal tersebut ditempuh kebijakan : (a) perumusan kebijakan strategis iptek terpadu (b) peningkatan peran penelitian, pengembangan dan rekayasa yang antisipatif dan responsif terhadap kepentingan pengguna; (c) meningkatkan kemampuan jaringan penelitian sebagai wadah keterpaduan diantara lembaga penelitian di daerah dan pusat; (d) fasilitasi kepada masyarakat dalam memperoleh perlindungan hukum berupa Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI).

Sasaran yang ingin dicapai adalah : (a) tersusunnya kebijakan strategis iptek terpadu; (b) terwujudnya hasil-hasil penelitian yang responsif terhadap pengguna baik bagi penyelenggaraan pemerintahan, maupun kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat; (c) optimalnya pemberdayaan jaringan penelitian antar lembaga penelitian dan masyarakat; (d) meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan atas hukum produk penelitian dan inovasi dalam menghadapi persaingan global.

Untuk mencapai sasaran tersebut dilakukan melalui program sebagai berikut :

1. Pengembangan Sumberdaya Iptek .

Kegiatannya meliputi : (a) Penyusunan kebijakan ilmu pengetahuan dan teknologi secara terpadu; (b) Penelitian untuk masukan penyusunan kebijakan pembangunan, yakni: (1) studi dalam rangka peningkatan PADS; (2) Penelitian masalah sosial ; (3) Penelitian pengembangan sistem penjamin sosial/kesehatan bagi masyarakat miskin; (4) Penelitian efektivitas kinerja organisasi Pemerintah Daerah; (c) Peningkatan kualitas sumberdaya manusia peneliti melalui kursus dan pelatihan; (d) Pemberdayaan lembaga penelitian melalui forum jaringan penelitian.

2. Penelitian dan Pengembangan.

Kegiatannya adalah fasilitasi pemanfaatan hasil-hasil penelitian pada masyarakat dengan teknologi tepat guna.

3. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Iptek.

Kegiatannya meliputi : (a) Koordinasi pemutahiran data Iptek; (b) Fasilitasi antar lembaga penghasil data dan informasi.

4. Fasilitasi Perlindungan Hukum HAKI.

Kegiatannya adalah memfasilitasi penemu teknologi dan masyarakat untuk memperoleh perlindungan hukum berupa Hak Atas Kekayaan Intelektual.

BAB VI

PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

DAN KETAHANAN BUDAYA

A. Kependudukan dan Ketenagakerjaan.

1. Kependudukan.

Berdasarkan Sensus Penduduk Tahun 2000 (*SP-2000*), jumlah penduduk di Jawa Tengah sebanyak 30.856.825 jiwa (7.842.634 Rumah Tangga), yang terdiri dari penduduk laki-laki 49,67 % dan perempuan 50,33 % dengan rasio jenis kelamin (*sex ratio*) 98,68. Laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,82 % dalam periode 1990-2000, dengan kepadatan 948 orang per Km².

Jumlah penduduk terbesar terdapat di Kabupaten Brebes yaitu sebanyak 1.695.163 jiwa (5,49 %) dengan kepadatan 1.023 orang per Km² dan terkecil di Kota Magelang sebanyak 116.000 jiwa (0,38 %) dengan kepadatan 6.402 orang per Km². Laju pertumbuhan tertinggi di Kota Salatiga yaitu sebesar 4,54 %. Disamping itu terdapat 2 (dua) Daerah dengan laju pertumbuhan negatif yaitu Kota Magelang (- 0,62 %) dan Kota Surakarta (- 0,32 %).

Berdasarkan pendataan keluarga sejahtera oleh BKKBN Propinsi Jawa Tengah tahun 2000, dari jumlah keluarga yang di data sebanyak 7.753.433 KK, terdapat Keluarga Pra Sejahtera (Pra KS) sebanyak 3.123.253 KK (40,28 %), jumlah terbanyak di Kabupaten Grobogan (70,79 %) dan terkecil di Kota Magelang (5,47 %). Jumlah Keluarga Sejahtera-I (*KS-I*) sebanyak 1.609.468 KK (20,76 %), jumlah terbanyak di Kota Pekalongan (33,60 %) dan terkecil di Kabupaten Rembang (8,56 %). Adapun Keluarga Sejahtera-II (*KS-II*), *KS-III* dan *KS-III Plus* berturut-turut

tercatat sebanyak 1.605.631 KK (20,71 %), 1.137.194 KK (14,67 %) dan 277.887 KK (3,58 %).

Berkaitan dengan KB, tercatat jumlah Pasangan Usia Subur (*PUS*) sebanyak 5.655.349 yang terdiri dari PUS berusia 20 tahun ke bawah, sebanyak 165.297 (2,92 %), PUS berusia 20—30 tahun sebanyak 1.955.314 (34,58 %) dan selebihnya berusia 30 tahun ke atas sebanyak 3.534.738 (62,50 %). Dari jumlah total PUS tersebut sebanyak 4.283.727 (75,75 %) merupakan Peserta KB Aktif dan selebihnya sebanyak 1.371.622 (24,25 %) adalah PUS bukan peserta KB.

Partisipasi masyarakat dalam ber KB dipengaruhi oleh efektivitas pemakaian alat kontrasepsi dengan tingkat perlindungan waktu yang lama, seperti Intra Uterine Device (IUD atau alat kontrasepsi dalam rahim), Methode Operasi (MO) dan Implant (Susuk KB atau alat kontrasepsi bawah kulit) yang biasa disebut Methode Kontrasepsi Jangka Panjang (*MKJP*). Dari jumlah total Peserta KB Aktif yang menggunakan MKJP sebanyak 1.595.338 (37,24 %), sedangkan yang Non MKJP sebanyak 2.688.389 (62,76%).

Peserta KB Aktif yang memperoleh pelayanan dengan cara membayar sendiri (*Peserta KB Mandiri*) tercatat sebanyak 2.289.567 (53,45 %), selebihnya sebanyak 1.994.160 (46,55 %) adalah peserta KB yang didukung dari dana pemerintah atau lembaga lain. Peserta KB wanita tercatat sebesar 96,31% sedangkan untuk pria relatif rendah yaitu sebesar 3,69 %. Rendahnya peserta KB pria antara lain dikarenakan pengetahuan dan pemahaman pria tentang jenis alat kontrasepsi pria, efek samping, efektivitas dan cara penggunaan, tempat mendapatkan pelayanan dan manfaat relatif masih rendah dan sebagian besar sikap suami berpendapat bahwa program KB hanya untuk perempuan saja.

PUS yang sedang hamil yang merupakan sasaran prioritas penggarapan untuk menjadi peserta KB Baru sebanyak 214.739 (15,66 %) dari total PUS bukan peserta KB. Sedangkan PUS Unmetneed (*tidak*

terlayani KB) sebanyak 771.435 (56,24 %) dari PUS tidak ber-KB atau sebanyak 13,64 % dari total PUS.

Sehubungan dengan hal di atas, maka permasalahan kependudukan mencakup pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas dan menyerasikan distribusi dan komposisi penduduk. Oleh karena itu kebijakan pembangunan kependudukan diarahkan : (1) meningkatkan kualitas dan perluasan cakupan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi bagi kelompok remaja, pria dan usia pasca reproduksi; (2) meningkatkan kualitas penyelenggaraan jaminan pelayanan kontrasepsi bagi keluarga miskin (*Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera-I*); (3) meningkatkan kualitas keluarga melalui peningkatan peran masyarakat dan sektor swasta secara mandiri; (4) meningkatkan program advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (*KIE*) serta pembinaan institusi masyarakat; (5) meningkatkan kualitas ketahanan keluarga melalui Bina Keluarga Balita (*BKB*), remaja, lansia dan keluarga rentan; serta (6) meningkatkan keikutsertaan kaum pria dalam ber-KB.

Sasaran yang akan dicapai adalah : (1) menurunnya Angka Kelahiran Total (*Total Fertility Rate/TFR*); (2) meningkatnya jaminan dan pelayanan program KB dan kesehatan reproduksi; (3) menurunnya persentase peserta KB yang tidak terlayani KB (*Unmet Need*); (4) meningkatnya partisipasi peserta KB mandiri dan peserta KB Pria; (5) meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pemakaian alat kontrasepsi efektif; (6) meningkatnya usia kawin pertama; (7) menurunnya jumlah Keluarga Pra Keluarga Sejahtera (*Pra KS*) dan Keluarga Sejahtera-I (*KS-I*); (8) terselenggaranya tertib administrasi kependudukan.

Untuk mencapai sasaran tersebut ditempuh program sebagai berikut :

a. Pemberdayaan Keluarga.

Kegiatannya meliputi : (1) Pemberdayaan ekonomi keluarga Pra KS dan KS-I ; (2) Pembinaan kelompok bina keluarga sejahtera ; dan (3) Pembinaan dan peningkatan ketahanan keluarga.

b. Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Kependudukan.

Kegiatannya adalah dalam rangka pengelolaan pelaksanaan administrasi kependudukan meliputi : (1) Pendataan, pengolahan dan analisis hasil pendataan keluarga ; dan (2) Pengelolaan administrasi kependudukan berupa: (a) Fasilitasi pengolahan data manual tingkat desa/kelurahan; dan (b) Pelaporan dan penyampaian informasi data kependudukan kepada publik yang cepat dan akurat.

c. Keluarga Berencana.

Kegiatannya meliputi : (1) Peningkatan jaminan dan perlindungan pelayanan KB ; dan (2) Peningkatan partisipasi pria dalam ber-KB.

d. Kesehatan Reproduksi Remaja.

Kegiatannya meliputi : (1) Promosi untuk pendewasaan usia kawin pertama bagi remaja ; (2) Menyelenggarakan forum komunikasi, edukasi dan advokasi untuk peningkatan pemahaman masyarakat, keluarga dan remaja terhadap kesehatan reproduksi remaja.

e. Penguatan Kelembagaan dan Jaringan KB.

Kegiatannya meliputi : (1) Peningkatan cakupan mutu pelayanan KB dan kesehatan reproduksi ; dan (2) Peningkatan kemandirian lembaga pelayanan KB dan kesehatan reproduksi yang berbasis masyarakat.

2. Ketenagakerjaan.

Berdasarkan Susenas 2000, jumlah penduduk yang bekerja sebanyak 14.491.222 orang, terdiri dari laki-laki 59,62 % dan perempuan 40,38 %. Dilihat dari lapangan pekerjaan, sektor pertanian masih menanggung beban yang tinggi yaitu tercatat 42,34 %, sektor perdagangan 20,91 %, industri pengolahan 15,71 %, dan jasa 10,98 %,

selebihnya bekerja di sektor konstruksi, listrik, gas dan air, pertambangan dan penggalian, angkutan, komunikasi dan keuangan.

Pada umumnya tingkat pendidikan tenaga kerja (*penduduk usia kerja*) relatif rendah, yaitu tamat SD ke bawah 71,63 %, SLTP 14,32 %, SLTA 11,52 % dan Perguruan Tinggi 2,53 %. Rendahnya tingkat pendidikan dan kemampuan tenaga kerja berakibat lemahnya daya saing untuk memasuki pasar kerja, terutama di luar negeri.

Tingkat Pengangguran Terbuka (*TPT*) tercatat sebesar 4,22 %, (*laki-laki 2,53 % dan perempuan 1,69 %*) atau sebanyak 637.900 orang. Dilihat dari kelompok umur, untuk umur 10-14 tahun sebanyak 16.084 orang (2,52 %), 15-19 tahun 187.260 orang (29,36 %), 20-24 tahun 243.393 orang (38,15 %), 25–29 tahun 108.516 orang (17,01 %), 30–59 tahun 78.508 orang (12,31 %), dan di atas 60 tahun 4.139 orang (0,65 %). Struktur tingkat pendidikannya, adalah SD ke bawah sebesar 32,96 %, SLTP 21,64 %, SLTA 35,46 % dan Perguruan Tinggi 9,94 %. Adapun jumlah setengah penganggur (*bekerja kurang dari 35 jam per minggu*) sebanyak 5.294.803 orang (36,54 %) dari jumlah penduduk yang bekerja, dengan proporsi laki-laki 48,17 % dan perempuan 51,83 %.

Dengan demikian, permasalahan mendasar pada pembangunan ketenagakerjaan, antara lain masih banyaknya jumlah penganggur dan setengah penganggur, relatif rendahnya kualitas dan produktivitas, rendahnya tingkat pendidikan tenaga kerja, pelatihan kerja yang belum memenuhi kebutuhan pasar dengan standar kualitas yang memadai, kesejahteraan tenaga kerja relatif rendah, belum seimbang antara Upah Minimum Regional (UMR) dengan Kebutuhan Hidup Minimum (KHM) yang pada tahun 2000 baru mencapai 78,47% dan hubungan industrial yang belum sepenuhnya berjalan harmonis. Selain itu, masih banyaknya TKI ilegal mengindikasikan masih lemahnya pemahaman dan kesadaran pekerja serta perusahaan pengirim dan pengguna jasa pekerja terhadap ketentuan dan peraturan pengiriman tenaga kerja ke luar negeri.

Salah satu alternatif untuk mengatasi masalah ketenagakerjaan ditempuh melalui penyelenggaraan transmigrasi. Selama ini melalui penyelenggaraan transmigrasi telah banyak memberikan kontribusi dalam rangka pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kondisi Jawa Tengah yang mendukung penyelenggaraan transmigrasi antara lain : (1) Banyaknya pengungsi sebagai akibat krisis sosial dari berbagai propinsi di luar Jawa yang mencapai 3.143 KK (Keadaan Bulan Juli 2001); (2) Banyaknya Keluarga Pra Sejahtera (Pra KS) dan Keluarga Sejahtera I (KS-I) merupakan sasaran potensial penyelenggaraan transmigrasi; (3) Penduduk yang telah mendaftarkan diri dan berminat sebagai calon transmigran sebanyak 4.256 KK, pada umumnya tidak mampu sebagai Transmigran Swakarsa Mandiri (TSM) dan memilih penempatan di Kawasan Barat Indonesia; (4) Terjadinya bencana alam di beberapa kabupaten/kota yang salah satu penanganannya dilakukan melalui resettlement (pemukiman kembali).

Sehubungan dengan hal tersebut, maka permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan transmigrasi antara lain banyaknya pengungsi (sebagian besar para transmigran yang kembali akibat kerusuhan) yang berada di Jawa Tengah dan masih menginginkan untuk bertransmigrasi, kemampuan ekonomi para calon Transmigran Swakarsa Mandiri (TSM) relatif lemah, terbatasnya lokasi penempatan transmigran di luar Jawa dan sebagian besar calon transmigran berminat di lokasi Kawasan Barat Indonesia.

Kebijakan pembangunan ketenagakerjaan diarahkan untuk (a) memperluas dan menciptakan lapangan kerja untuk mengurangi jumlah penganggur dan setengah penganggur yang berbasis pada potensi lokal; (b) memberdayakan dan meningkatkan kualitas, produktivitas dan kesejahteraan tenaga kerja baik di perkotaan maupun di perdesaan; (c) menyempurnakan prosedur dan tata cara pengiriman dan penempatan TKI ke luar negeri serta peningkatan Informasi Pasar Kerja (IPK); (d) mengembangkan sistim jaminan sosial tenaga kerja dalam rangka

perlindungan, keamanan dan keselamatan kerja dengan melibatkan unsur perusahaan, pekerja dan pemerintah; (e) perlindungan tenaga kerja, termasuk di dalamnya pekerja anak, penyandang cacat dan pekerja wanita sesuai dengan kondisi dan kemampuannya; (f) meningkatkan kualitas pelaksanaan dan pelayanan program transmigrasi melalui peningkatan Sumber Daya Manusia (*SDM*), partisipasi aktif masyarakat dalam penyelenggaraan transmigrasi dan menjalin hubungan kerjasama yang harmonis antara Pemda daerah asal dengan daerah penempatan.

Sasaran yang akan dicapai adalah : (a) menurunnya jumlah penganggur dan setengah penganggur melalui perluasan kesempatan kerja dan berusaha; (b) meningkatnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja; (c) meningkatnya hubungan industrial yang harmonis, kesejahteraan dan perlindungan tenaga kerja; (d) tersusunnya perencanaan tenaga kerja daerah; (e) tersedianya sistem informasi ketenagakerjaan dan ketransmigrasian (f); meningkatnya kualitas pelayanan transmigrasi; dan (g) meningkatnya minat masyarakat untuk bertransmigrasi.

Untuk mencapai sasaran tersebut ditempuh program sebagai berikut :

a. Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja.

Kegiatannya meliputi : (1) Peningkatan kesempatan kerja dan berusaha melalui: (a) Pembinaan dan pengembangan usaha mandiri, sektor informal dan ekonomi produktif, (b) Pembinaan dan pengembangan kesempatan kerja dan berusaha bagi penyandang cacat, dan (c) Fasilitasi, penyiapan, pembekalan, penyaluran dan penempatan tenaga kerja ke luar negeri, (d) Perintisan kerjasama ketenagakerjaan antar propinsi dan luar negeri; (2) Survey Angkatan Kerja Daerah (*SAKERDA*) dan Penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja Daerah (*PTKD*); (3) Penyusunan dan pengembangan sistem informasi ketenagakerjaan dan ketransmigrasian; (4) Pengembangan bursa kerja terpadu; (5) Penyiapan, pengerahan, penempatan dan pemberdayaan

transmigrasi dan pemukiman kembali (Resettlement); (6) Perintisan dan pengembangan kerjasama program transmigrasi meliputi: (a) Perintisan kerjasama program transmigrasi dengan propinsi lain, (b) Pengembangan kerjasama program transmigrasi dengan Propinsi Kalimantan Tengah, Jambi, Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur dan Sumatera Selatan, dan (c) Pemukiman kembali (Resettlement) di Kabupaten Cilacap, Temanggung, Jepara, Wonogiri, Pati, Purworejo, Batang, Tegal, Pemalang, Brebes dan Kebumen; serta (8) Identifikasi potensi dan minat para pengungsi (*Eksodan*) untuk bertransmigrasi dan potensi calon lokasi transmigran.

b. Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja.

Kegiatannya meliputi : (1) Pelatihan calon tenaga kerja dan pekerja; (2) Pemagangan; (3) Optimalisasi pemanfaatan lembaga pelatihan, pemasyarakatan kegiatan pelatihan dan pengembangan kegiatan pelatihan termasuk kerjasama dengan lembaga pendidikan formal, swasta, BUMN, Jamsostek dan LSM; (4) Peningkatan dan pemasyarakatan produktivitas tenaga kerja; (5) Akreditasi, sertifikasi, kompetensi dan uji ketrampilan; dan (6) Pelatihan calon transmigran dan transmigran di lokasi pemukiman kembali (Resettlement).

c. Perlindungan dan Pengembangan Hubungan Industrial.

Kegiatannya meliputi : (1) Perlindungan, pengembangan hubungan industrial dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja melalui : (a) Pemasyarakatan dan pembudayaan perlindungan dan hubungan industrial tenaga kerja, (b) Peningkatan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), (c) Peningkatan kesejahteraan pekerja, (d) Penetapan dan pengawasan pelaksanaan upah minimum, (e) Penanggulangan pekerja anak, perlindungan tenaga kerja wanita dan penyandang cacat, (f) Regulasi tentang perlindungan dan penempatan TKI, pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran Kesepakatan Kerja Bersama (KKB), penyempurnaan Perda tentang Wajib Latih Tenaga Kerja

Perusahaan (*WLTKP*) dan Iuran Wajib Latih Tenaga Kerja Perusahaan (*IWLTKP*), Pengawasan norma K3; (2) Pemberdayaan organisasi pekerja dan lembaga ketenagakerjaan; dan (3) Study kelayakan dampak sosial terhadap lingkungan industri.

B. Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda Dan Olahraga.

1. Pendidikan.

Permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan pendidikan antara lain : (a) belum meratanya kesempatan memperoleh pendidikan; (b) kualitas dan relevansi pendidikan belum sesuai; (c) manajemen dan kemandirian masih lemah; dan (d) kurangnya peran masyarakat dan sekolah.

Kenyataan demikian menimbulkan pemikiran dan bahkan keyakinan, bahwa sektor pendidikan harus mendapat perhatian tersendiri dalam pembangunan suatu daerah. Hal ini dapat disadari bahwa hanya melalui pendidikanlah tingkat kecerdasan rakyat dapat ditingkatkan yang pada gilirannya dapat meningkatkan kemampuan dan produktivitas pada tingkat individu, keluarga, masyarakat dan daerah.

Sesuai data tahun 2000, kurangnya pemerataan ditandai oleh Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk tingkat Sekolah Dasar yang mencapai 106,76 % sedangkan Angka Transisi (AT) sebesar 74,31 % dan angka Drop Out (DO) sebanyak 10.978 murid. Pada tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama APK mencapai 79,94 % sementara AT sebesar 62,09% dan DO sebanyak 11.129 murid. Pada tingkat Sekolah Menengah APK sebesar 38,72 % dan tingkat DO sebanyak 10.187 murid, dan tingkat melanjutkan ke Perguruan Tinggi relatif masih rendah, karena berbagai faktor

diantaranya rendahnya kondisi ekonomi keluarga, kesadaran keluarga, dan terbatasnya daya tampung Perguruan Tinggi.

Disamping itu, jumlah pekerja anak semakin marak, mencapai 21.711 anak, karena diantaranya kondisi ekonomi keluarga yang tidak mampu sehingga anak dipandang lebih menguntungkan difungsikan sebagai tenaga kerja. Phenomena pekerja anak berarti perihal hilangnya kesempatan anak untuk berinteraksi dan bersosialisasi dengan sesamanya (seusia) dalam lingkungan edukatif, yang berimplikasi pada buruknya pembentukan dan perkembangan intelektual, emosi maupun kepribadiannya.

Pada sisi lain, penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah (PLS) belum sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini dikarenakan terbatasnya penyediaan sarana, prasarana dan fasilitas, serta belum adanya ukuran/ standar pelayanan minimal penyelenggaraan PLS.

Masalah kualitas dan relevansi pendidikan sangat berkaitan dengan efektivitas penyelenggaraan proses belajar mengajar. Hal ini disebabkan karena terbatasnya penyediaan sarana dan prasarana, rendahnya kualitas tenaga kependidikan, metode mengajar dan kurikulum yang belum sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Penyediaan prasarana fisik gedung, dan fasilitas lainnya seperti penyediaan buku pokok dan penunjang, alat peraga dan alat penunjang pendidikan lainnya dirasakan kurang memadai.

Sedangkan kualitas tenaga kependidikan saat ini dirasakan masih relatif rendah, tampak pada belum terpenuhinya kualifikasi/standar kelayakan mengajar di semua jenis dan jenjang sekolah. Hal ini ditandai oleh presentase kelayakan guru

mengajar pada SD/MI baru mencapai 41,43 %; SLTP/ MTs 47,23 % dan SMU/ SMK/ MA 84,31 %.

Kebijakan pembangunan pendidikan adalah : (a) perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu; (b) peningkatan kemampuan akademik dan profesionalitas serta kesejahteraan tenaga kependidikan; (c) pemberdayaan lembaga pendidikan baik formal maupun informal di dalam pembentukan dan pengembangan nilai, sikap dan kemampuan serta meningkatkan partisipasi keluarga dan masyarakat dalam pendidikan; (d) peningkatan kualitas pelayanan lembaga pendidikan masyarakat maupun pemerintah untuk mencapai efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan; (e) penetapan standarisasi pelayanan bidang pendidikan untuk mencegah terjadinya kesenjangan kualitas layanan antar Daerah; (f) pengembangan kualitas SDM sedini mungkin secara terarah, terpadu dan keberlanjutan.

Sasaran pembangunan pendidikan meliputi : (a) meningkatnya pemerataan pelayanan pendidikan; (b) meningkatnya kualitas dan relevansi pendidikan; (c) meningkatnya manajemen dan kemandirian; dan (d) meningkatnya peran masyarakat dalam pembangunan pendidikan.

Untuk mencapai sasaran tersebut ditempuh program sebagai berikut :

a. Pendidikan Dasar dan Prasekolah.

Kegiatannya meliputi : (1) Peningkatan Pemerataan Pendidikan : (a) Peningkatan sarana dan pra sarana pendidikan dasar dan pra sekolah, serta pendidikan luar biasa; (b) Peningkatan mutu sekolah swasta dan pendidikan luar biasa; (c) Penerapan alternatif layanan pendidikan bagi

masyarakat kurang mampu; (d) Revitalisasi dan regrouping; (e) Pemberian bea siswa pada siswa berprestasi khususnya berasal dari keluarga kurang mampu; (f) Pemberian kemudahan, bantuan lembaga penitipan anak, kelompok bermain, dan Taman Kanak-kanak, serta pendidikan luar biasa; (g) Peningkatan Pelayanan Pendidikan Luar biasa; (2) Peningkatan Kualitas Pendidikan: (a) Peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan tenaga kependidikan, serta Wiyata Bhakti; (b) Penyusunan kurikulum muatan lokal yang berbasis kompetensi dasar dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat; (c) Penyediaan dan perawatan sarana dan prasarana pendidikan; (d) Penyusunan standar pelayanan minimum pendidikan dasar dan pra sekolah; (e) Peningkatan efisiensi dan efektivitas proses kegiatan belajar mengajar; (f) Peningkatan kualitas siswa; (g) Pengembangan pendidikan budi pekerti; (h) Peningkatan kerja sama antar lembaga pendidikan; (3) Penataan Sistem dan Kelembagaan melalui : (a) Melaksanakan desentralisasi pendidikan, manajemen berbasis sekolah sesuai dengan kondisi aspirasi dan kemampuan daerah; (b) Meningkatkan partisipasi masyarakat; (c) Mengembangkan sistem insentif dan kompetitif yang sehat antar lembaga; (d) Pengembangan sistem akreditasi untuk negeri dan swasta; (e) Peningkatan Sistem Informasi Manajemen (SIM) kependidikan dasar dan pra sekolah.

b. Pendidikan Menengah.

Kegiatannya meliputi : (1) Peningkatan Pemerataan Pendidikan : (a) Peningkatan sarana dan pra sarana pendidikan menengah serta pendidikan luar biasa; (b) Peningkatan mutu sekolah swasta dan pendidikan luar biasa; (c) Penerapan alternatif layanan pendidikan bagi masyarakat

kurang mampu; (d) Pemberian bea siswa pada siswa berprestasi khususnya berasal dari keluarga kurang mampu; (2) Peningkatan Kualitas Pendidikan : (a) Peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan tenaga kependidikan, serta Wiyata Bhakti; (b) Peningkatan kemampuan penguasaan ilmu dasar; (c) Peningkatan standar mutu pelayanan pendidikan; (d) Pengembangan kurikulum daerah; (e) Kerja sama dengan dunia usaha dan industri; (f) Peningkatan kemampuan penyusunan karya ilmiah; (g) Pengembangan pendidikan budi pekerti; (h) Peningkatan kerja sama antar lembaga pendidikan; (i) Perintisan sekolah unggulan; (3) Peningkatan Kualitas Manajemen melalui : (a) Pelaksanaan desentralisasi (Komite Sekolah yang ikut berperan merencanakan, mengimplementasikan, meng-evaluasi penyelenggaraan pendidikan, Dewan Sekolah); (b) Meningkatkan kemandirian dengan manajemen berbasis sekolah; (c) Mengembangkan sistem akreditasi untuk negeri dan swasta; (d) Mengembangkan sistem insentif dan kompetisi yang sehat; (e) Peningkatan Sistem Informasi Manajemen (SIM) kependidikan menengah.

c. Pendidikan Tinggi.

Kegiatannya meliputi : (a) Peningkatan koordinasi penelitian pendidikan dan pengabdian masyarakat; (b) Fasilitasi penyelenggaraan pendidikan tinggi; (c) Peningkatan kerjasama antar lembaga pendidikan tinggi; (d) Pendampingan pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi.

d. Pendidikan Luar Sekolah .

Kegiatannya meliputi : (a) Mempercepat penuntasan wajar dikdas 9 tahun dan Pemberantasan Buta Aksara Fungsional (PBAF) melalui program keaksaraan fungsional (PAF),

pembentukan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan kelompok belajar (Kejar) Paket A , B dan C; (b) Menyusun standar pelayanan minimal pendidikan luar sekolah; (c) Meningkatkan ketrampilan dan kemampuan kewirausahaan; (d) Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan luar sekolah secara bertahap; (e) Mengembangkan kerjasama yang saling menguntungkan melalui pola kemitraan dengan dunia usaha dan industri; (f) Meningkatkan kualitas tenaga kependidikan luar sekolah;

2. Kebudayaan.

Membangun kebudayaan mempunyai fungsi, yakni untuk tetap mempertahankan dan melestarikan secara dinamis. Namun permasalahan yang dihadapi adalah peran institusi akademis belum optimal memberikan kontribusi dalam mengangkat derajat berkesenian dan apresiasi karya seni sebagai salah satu unsur budaya. Permasalahan di bidang kebahasaan adalah belum dipahaminya penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, rendahnya rasa kebanggaan terhadap penggunaan Bahasa Indonesia.

Selain itu perhatian dan dukungan pemerintah dan masyarakat terhadap perkembangan sastra daerah masih kurang, termasuk penghargaan terhadap karya sastra dan sastrawan. Terbatasnya jangkauan layanan perpustakaan menjadi masalah pula dalam membudayakan gemar membaca dan menjadikan perpustakaan sebagai pusat informasi dan sumber ilmu pengetahuan bagi masyarakat.

Pesatnya perkembangan teknologi dan arus informasi dapat menyebabkan masyarakat yang belum siap akan memilih dan memilah tatanan nilai-nilai budaya asing, sehingga

menimbulkan perilaku menyimpang dari nilai-nilai luhur budaya bangsa. Disamping itu rendahnya peran serta masyarakat dan swasta dalam upaya penyelamatan, pemeliharaan, perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan benda cagar budaya, menyebabkan pelestarian kebudayaan daerah tidak optimal.

Dengan memperhatikan kondisi tersebut, kebijakan pembangunan bidang Kebudayaan adalah : (a) mengembangkan kebudayaan daerah yang bersumber dari warisan budaya luhur bangsa, budaya daerah yang mengandung nilai-nilai universal termasuk kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa; (b) mengembangkan sikap kritis terhadap nilai-nilai budaya asing untuk disesuaikan dengan kondisi daerah; (c) mengembangkan kebebasan berkreasi dengan tetap memperhatikan etika, moral, estetika dan agama serta memberikan penghargaan terhadap seniman atau pelaku seni budaya; (d) meningkatkan perfilman daerah; (e) melestarikan apresiasi nilai kesenian dan kebudayaan tradisional dan menjadikannya sebagai tempat bagi pengembangan pariwisata daerah, nasional dan internasional; (f) mengembangkan budaya gemar membaca.

Sedangkan sasaran yang akan dicapai meliputi : (a) meningkatnya peran perpustakaan daerah sebagai pusat informasi dan sumber ilmu pengetahuan; (b) berkembangnya kreasi berkesenian dan meningkatkan apresiasi budaya daerah; (c) pelestarian tradisi dan peninggalan sejarah; (d) terbinanya organisasi dan penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Untuk mencapai sasaran tersebut ditempuh program sebagai berikut :

a. Kebahasaan, Kesusasteraan dan Kepustakaan.

Kegiatannya meliputi: (1) Meningkatkan pembinaan dan pengembangan bahasa nasional dan daerah melalui pelatihan, penyuluhan dan lomba penulisan sastra; (2) Meningkatkan kepustakaan dan budaya ilmiah berupa peningkatan jumlah dan jenis bahan pustaka, jangkauan layanan perpustakaan, perawatan dan pelestarian bahan pustaka, penelitian dan pengkajian perpustakaan dan minat baca, pengembangan profesionalisme pustakawan, serta pengembangan kebiasaan menulis dan pola berpikir kritis.

b. Pembinaan Kesenian dan Nilai-Nilai Budaya.

Kegiatannya meliputi : (1) Pembinaan nilai-nilai budaya bangsa dan pengembangan sikap kritis; (2) Pembinaan lembaga dan organisasi kesenian; (3) Meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan seniman.

c. Pembinaan Tradisi, Peninggalan Sejarah dan Permuseuman.

Kegiatannya meliputi : (1) Pembinaan dan pengembangan tradisi, peninggalan sejarah, purbakala dan permuseuman; (2) Penelusuran dan penggalian terhadap warisan sejarah dan budaya bangsa; (3) Pembinaan lembaga adat yang diakui dan dianut oleh masyarakat.

d. Pembinaan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Kegiatan yang dilaksanakan yaitu melakukan pembinaan dan fasilitasi terhadap penganut dari organisasi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

3. Generasi Muda.

Permasalahan internal yang terjadi pada generasi muda, antara lain rendahnya tingkat pendidikan penduduk usia kerja dan gejala penurunan nilai – nilai moral dan budi pekerti,

munculnya tindakan anarkhis, mulai ditinggalkannya kebudayaan daerah dan mudarnya rasa solidaritas kebangsaan. Sedangkan permasalahan eksternal dipengaruhi oleh perubahan dinamika global, antara lain transformasi budaya asing yang tidak sesuai dengan masyarakat setempat yang mengakibatkan ditinggalkannya norma sosial yang berlaku di masyarakat, sikap individualistis, meningkatnya penggunaan minuman keras dan narkoba.

Kebijakan yang akan dilaksanakan yaitu : (a) meningkatkan pembinaan dan pengembangan sikap perilaku yang baik di kalangan generasi muda secara dini, terpadu dan berkelanjutan; (b) menumbuhkan kemandirian pemuda melalui pemanduan motivasi, aspirasi, dan kreativitas ke dalam gerak pembangunan; (c) menanamkan jiwa kewirausahaan yang mandiri dan profesional; (d) meningkatkan peran serta lembaga/organisasi kepemudaan sebagai wadah pengembangan bakat, minat, kreativitas dan ketrampilan pemuda.

Sasaran yang akan dicapai adalah : (a) terwujudnya kader penerus perjuangan bangsa yang bertaqwa kepada Tuhan YME, berwawasan kebangsaan, disiplin, bertanggung jawab, berbudi pekerti luhur; (b) meningkatnya kualitas generasi muda dan menumbuhkan sikap tanggap terhadap permasalahan, lingkungan dan mempunyai visi pembangunan ke depan; (c) meningkatnya peran serta generasi muda secara nyata di berbagai bidang dan sektor pembangunan.

Untuk mencapai sasaran tersebut ditempuh program pembangunan kepemudaan dengan kegiatan meliputi : (a) Mengembangkan sentra pemberdayaan pemuda melalui kelompok usaha produktif; (b) Bimbingan teknis manajemen kewirausahaan pemuda; (c) Memotivasi pemuda terdidik ke

perdesaan; (d) Mengembangkan jaringan kerjasama kepemudaan antar daerah/regional/nasional/internasional; (e) Penyuluhan dan kampanye tentang dampak negatif budaya asing, bahaya penyalahgunaan NAPZA dan miras serta penyebaran penyakit HIV/AIDS dan penyakit menular seksual dikalangan pemuda dan pelajar; (f) Meningkatkan peran aktif pemuda dalam penanggulangan kenakalan remaja dan kriminalitas serta pemahaman, penanaman nilai-nilai, penghormatan terhadap supremasi hukum dan hak asasi manusia (HAM) dikalangan pemuda dan pelajar; (g) Meningkatkan kegiatan ekstra kurikuler dan kegiatan kepramukaan.

4. Olah Raga.

Pembinaan prestasi atlet dewasa ini dihadapkan pada keterbatasan kemampuan dana, sarana dan prasarana, serta kurang terarahnya pola pembinaan, pembibitan dan pemanduan bakat prestasi atlet sejak usia dini. Sementara itu kurangnya jaminan masa depan bagi atlet berpengaruh terhadap menurunnya minat orang tua dan masyarakat untuk mendorong putra-putrinya menekuni dan berkarier di bidang olahraga.

Kebijakannya diarahkan untuk mengembangkan olahraga bagi pelajar, mahasiswa dan masyarakat dengan menumbuhkan rasa kecintaan berolahraga dan menjadikan olahraga sebagai tuntutan kebutuhan untuk mewujudkan pola hidup sehat.

Sasaran yang ingin dicapai adalah : (a) berdayagunanya lembaga/organisasi olahraga daerah untuk dikelola secara profesional dalam rangka menunjang peningkatan prestasi; (b) meningkatnya sarana dan prasarana serta fasilitas olahraga; (c) meningkatnya prestasi olahraga melalui forum Nasional maupun Internasional; (d) tumbuhnya kecintaan masyarakat terhadap olahraga.

Untuk mencapai sasaran tersebut ditempuh program pembangunan olah raga yang kegiatannya meliputi :

- a. Pemasyarakatan olahraga, yaitu : (1) Menye-lenggarakan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) serta konseling tentang pendidikan jasmani, olahraga rekreasi, dan olahraga bagi kesegaran jasmani; (2) Melaksanakan pembentukan, pembinaan, dan pemberdayaan olahraga pelajar-mahasiswa dan masyarakat; (3) Melaksanakan bimbingan kegiatan olahraga dan pendidikan jasmani di sekolah dan masyarakat.
- b. Peningkatan prestasi olahraga, yaitu : (1) Pembinaan dan pembibitan olahraga; (2) Pembinaan prestasi olah raga; (3) Peningkatan sumberdaya tenaga keolahragaan; (4) Meningkatkan sarana dan prasarana olahraga; (5) Pemanfaatan IPTEK olahraga; (6) Pengembangan kelembagaan dan organisasi olahraga; (7) Pemberian penghargaan/besiswa bagi atlit berprestasi.

C. Kesehatan.

Pembangunan kesehatan telah berhasil meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, yang ditandai dengan menurunnya Angka Kematian Bayi (AKB) dari 51,7 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 1997 menjadi 36,67 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 1999, Angka Kematian Ibu (AKI), menurun dari 343 per 10.000 kelahiran hidup menjadi 152 per 10.000 kelahiran hidup dalam periode yang sama serta meningkatnya usia harapan hidup dari 67,32 tahun pada tahun 1995 menjadi 67,97 tahun pada tahun 1999 (sumber data : Dinas Kesehatan Prop. Jateng).

Angka kesakitan (morbidity rate) menunjukkan bahwa penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan mencapai 31,47 %. Beberapa jenis

keluhan adalah pilek 54,32 %, batuk 47,48 %, panas 31,59 % dan sakit kepala 15,56 % (sumber data : Statistik Kesejahteraan Rakyat, 2000, BPS Jakarta).

Permasalahan yang dihadapi saat ini, antara lain adanya kecenderungan meningkatnya morbiditas beberapa penyakit menular diantaranya malaria dari 1,09 menjadi 1,78 per 1.000 penduduk, demam berdarah dengan incidence rate 1,4 % dan HIV ditemukan pada 25 penderita, sedangkan AIDS ada 4 kasus. Disamping itu masih belum teratasinya permasalahan penyakit menular lainnya, diantaranya TB Paru dengan BTA positif 6,9 %, Diarhe 14,4 % dan ISPA 24,21 %. Pada sisi lain morbiditas penyakit tidak menular, penyakit degeneratif, ruda paksa (perkosaan), kecelakaan lalu lintas, perlu diperhatikan dan diwaspadai dimasa mendatang.

Disamping itu belum memadainya pelayanan kesehatan sesuai standard pelayanan dan lingkungan yang belum optimal dapat menghambat terhadap pemutusan mata rantai penularan penyakit maupun dalam pelayanan kesehatan masyarakat. Kondisi ini dapat mendorong menurunnya derajat kesehatan pada kelompok rentan, bayi, ibu hamil dan menyusui serta anak Balita, pra sekolah dan wanita subur, terutama pada keluarga yang kurang mampu.

Kebijaksanaan yang ditempuh adalah : (a) pemantapan manajemen pembangunan kesehatan dengan konsep paradigma sehat secara sinergis lintas sektor; (b) Peningkatan peran aktif masyarakat dan swasta; (c) Pengembangan tenaga kesehatan yang berpegang pada pengabdian dan etika profesi; (d) Penyelenggaraan upaya kesehatan dan penyehatan lingkungan.

Sasaran yang akan dicapai adalah: (a) meningkatnya kualitas manajemen pembangunan kesehatan; (b) meningkatnya perilaku hidup sehat; (c) meningkatnya pelayanan kesehatan; dan (d) meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.

Untuk mencapai sasaran tersebut ditempuh program sebagai berikut :

1. Perilaku Hidup Sehat dan Pemberdayaan Masyarakat.

Kegiatannya meliputi : (a) Penyuluhan tentang kepedulian dan gerakan masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan Rumah tangga, Sekolah, Tempat kerja dan Tempat Umum; (b) Pemberdayaan masyarakat dalam upaya pelayanan kesehatan melalui Usaha Kesehatan Berbasis Masyarakat.

2. Lingkungan Sehat.

Kegiatannya meliputi : (a) Promosi hygiene dan sanitasi di tingkat individu keluarga dan masyarakat, melalui penyehatan makanan; (b) Penyehatan kualitas air dan lingkungan; (c) Penyehatan lingkungan pemukiman; (d) Penyehatan tempat-tempat umum; (e) Penyusunan strategi pengembangan Kab/Kota Sehat termasuk kawasan bebas rokok

3. Upaya Pelayanan Kesehatan.

Kegiatannya meliputi : (a) Pengembangan paradigma baru Puskesmas; (b) Penyediaan Obat Kejadian Luar Biasa (KLB)/Bencana Alam dan Pelatihan kegawatdaruratan obstetri dan Neonatal, KLB, Kecelakaan Lalu Lintas (KLL) bagi petugas Puskesmas; (c) Pengembangan Program Perawatan kesehatan masyarakat; (d) Pelayanan Kesehatan daerah perbatasan dan terpencil; (e) Revitalisasi Badan Pembinaan Kesehatan Jiwa Masyarakat (BPKJM); (f) Pelayanan kesehatan khusus; (g) Peningkatan kualitas manajemen pelayanan kesehatan di RS; (h) Upaya Kesehatan Reproduksi; (i) Peningkatan ketrampilan Deteksi Dini tumbuh kembang balita dan penyusunan modul konseling kesehatan balita; (j) Pengembangan model Pelayanan kesehatan Lansia; (k) Pemberantasan dan pencegahan penyakit (penularan

melalui hewan, penularan langsung dan penyakit degeneratif) serta imunisasi; (l) Mengembangkan Surveilans epidemiologi.

4. Pengawasan Obat, Makanan dan Bahan Berbahaya.

Kegiatannya meliputi : (a) Pengamanan dan pengawasan terhadap pemakaian dan distribusi obat, napza, dan bahan berbahaya (NAPZA) ; (b) Peningkatan Penggunaan dan pembinaan pengobatan tradisional serta mengembangkan Industri Kecil Farmasi ; (c) Penerapan obat rasional

5. Sumber Daya Kesehatan.

Kegiatannya meliputi : (a) Sinkronisasi kebijakan perencanaan dan manajemen pembangunan kesehatan; (b) Pendayagunaan tenaga kesehatan bagi tenaga kesehatan strategis; (c) Pendidikan dan pelatihan teknis fungsional dan pra tugas bagi tenaga medis dan paramedis; (d) Penyediaan sarana dan prasarana serta dukungan logistik pelayanan kesehatan; (e) Menginventarisasi dan updating data sarana dan sumber daya pelayanan kesehatan dasar dan rujukan; (f) Penelitian dan pengembangan model dan teknologi berbagai upaya kesehatan.

6. Perbaikan Gizi Masyarakat.

Kegiatannya meliputi : (a) Penanggulangan Anemi Gizi zat besi dan kekurangan vitamin (b) Penanggulangan GAKI di daerah Endemis; (c) Penanganan Kasus gizi makro/buruk dengan penyakit komplikasi; (d) Melaksanakan fortifikasi dan keragaman pangan; (e) Memantapkan sistem kewaspadaan pangan dan Gizi.

D. Kesejahteraan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Anak Dan Remaja.

1. Kesejahteraan Sosial.

Permasalahan kesejahteraan sosial yang menjadi perhatian utama antara lain masih tingginya populasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), masih lemahnya pelayanan sosial lewat panti maupun diluar panti dan belum optimalnya penanganan bagi korban bencana.

Kebijakan pembangunan di bidang kesejahteraan sosial diarahkan untuk :
(a) peningkatan dan perluasan pelayanan kesejahteraan sosial; (b) pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keberintisan dan kejuangan serta nilai-nilai kesetiakawanan sosial.

Sasaran yang akan dicapai adalah : (a) meningkatnya kesejahteraan sosial bagi masyarakat penyandang masalah sosial; (b) berkembangnya potensi dan sumber daya sosial untuk mendukung pelayanan kesejahteraan sosial dan; (c) meningkatnya partisipasi masyarakat, lembaga dan organisasi sosial dalam meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat.

Untuk mencapai sasaran tersebut ditempuh program sebagai berikut :

a. Pengembangan Kesejahteraan Sosial.

Kegiatannya meliputi : (1) Pemberian santunan kepada lanjut usia potensial, dan veteran/pahlawan beserta keluarganya; (2) Penanganan anak dan remaja terlantar; (3) Pembinaan Usaha Kesejahteraan Sosial bagi keluarga miskin.

b. Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial.

Kegiatannya meliputi : (1) Penyempurnaan sarana dan prasarana panti sosial; (2) Peningkatan SDM Pengelola Panti Sosial ; (3) Rehabilitasi Penyandang cacat, penanganan terhadap bekas penyandang penyakit kusta/kronis; (4) Rehabilitasi dan penanganan terhadap Eks Narapidana, PGOT, Pekerja Seks, Anak jalanan dan Anak nakal.

c. Peningkatan Partisipasi Sosial Kemasyarakatan.

Kegiatannya adalah bimbingan dan pemantapan manajemen pembangunan yang partisipatif bagi organisasi sosial, Karangtaruna, peguyuban PSM, masyarakat daerah perbatasan, tepi hutan serta masyarakat kumuh/nelayan.

d. Penanggulangan Bencana Alam.

Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah (1) penanggulangan akibat bencana; (2) Penyelamatan, rehabilitasi dan pemberian bantuan kepada korban bencana.

2. Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Remaja.

Permasalahan pemberdayaan perempuan, yang masih menjadi perhatian utama antara lain rendahnya derajat kualitas hidup perempuan, kurangnya pemahaman pengarusutamaan jender pada pengambil keputusan dan pengelola pembangunan, masih rendahnya Indeks Pembangunan Jender dan Indeks Pemberdayaan Jender. Adapun permasalahan anak dan remaja antara lain masih tingginya populasi anak dan remaja penyandang masalah, meningkatnya kasus pelecehan dan pemerkosaan anak dibawah umur, serta banyaknya jumlah pekerja anak di sektor formal dan informal.

Kebijakan pembangunan pemberdayaan perempuan diarahkan untuk : (a) meningkatkan kualitas sumberdaya perempuan; (b) memantapkan pengarusutamaan jender bagi pengambil kebijakan dan pengelola pembangunan; (c) memantapkan peran masyarakat dan jaringan organisasi / kelembagaan.

Sasaran yang akan dicapai adalah : (a) meningkatnya kualitas hidup perempuan; (b) meningkatnya kualitas pranata dan kelembagaan pemberdayaan perempuan; (c) mantapnya pengarusutamaan jender bagi pengambil kebijakan dan pengelola pembangunan; (d) meningkatnya kesetaraan keadilan jender dan penegakan HAM perempuan.

Kebijakan pembangunan anak remaja diarahkan untuk (a) meningkatkan kualitas sumber daya anak dan remaja; (b) menumbuhkan rasa cinta tanah air, persatuan dan kesatuan bangsa; (c) menciptakan iklim yang kondusif bagi perkembangan dan perlindungan anak dan remaja; (d) pemenuhan hak–hak anak dan remaja.

Sasaran yang akan dicapai adalah : (a) meningkatnya kualitas sumber daya anak dan remaja; (b) tumbuhnya rasa cinta tanah air, persatuan dan kesatuan bangsa; (c) meningkatnya iklim yang kondusif baik dalam lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat bagi perkembangan dan perlindungan anak dan remaja dalam tumbuh kembang mereka; (d) terpenuhinya hak – hak anak dan remaja dalam rangka mencapai kesejahteraan terhadap anak dan remaja.

Untuk mencapai sasaran pembangunan pemberdayaan perempuan, anak dan remaja ditempuh program sebagai berikut :

a. Pemberdayaan Perempuan.

Kegiatannya meliputi : (1) Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya perempuan dalam berbagai aspek kehidupan; (2) Peningkatan kesetaraan, keadilan jender dan penegakan HAM perempuan; (3) Peningkatan peran serta perempuan dalam penentuan kebijakan; (4) Perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan.

b. Anak dan Remaja.

Kegiatannya melalui koordinasi pelaksanaan dalam upaya mewujudkan: (1) Peningkatan kualitas sumber daya anak dan remaja; (2) Penanganan anak dan remaja yang bermasalah; (3) Perlindungan hak – hak anak dan remaja.

c. Peningkatan Peran Masyarakat dan Pemampuan Kelembagaan Pengarusutamaan Jender.

Kegiatannya meliputi : (1) Peningkatan kualitas dan pementapan jaringan organisasi dan kelembagaan yang peduli terhadap

pemberdayaan perempuan; (2) Pemantapan pengarus utamaan jender bagi pengambil kebijakan dan pengelola pembangunan; (3) Peningkatan peranserta lembaga kemasyarakatan, organisasi wanita dan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam pemantapan pengarusutamaan jender; (4) Validasi dan analisis jender dalam data statistik.

E. Agama.

Pembangunan bidang agama sebagai salah satu faktor pembentukan masyarakat madani masih dihadapkan pada berbagai masalah yang perlu mendapatkan perhatian dan penanganan secara terpadu dan berkelanjutan, antara lain masih kurang dihayatinya ajaran agama sehingga dalam pengamalannya belum sesuai dengan esensi keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Pendidikan agama, selama ini ada kecenderungan mengajarkan pada masalah keakhiratan/ukhrawi serta kurang menyentuh amaliah dan duniawiah, kegiatan belajar mengajar belum optimal, keterbatasan sarana prasarana dan belum memadainya mutu tenaga kependidikan. Masalah lain adalah belum optimalnya pengembangan pribadi, watak, dan akhlak mulia yang dilakukan oleh keluarga, lembaga sosial keagamaan, lembaga pendidikan tradisional keagamaan dan tempat-tempat ibadah. Disisi lain, perilaku sosial yang menyimpang dari nilai – nilai ajaran agama, budi pekerti dan perkembangan norma yang berlaku di masyarakat merupakan tantangan yang berkembang pada saat ini.

Kebijakan yang ditempuh adalah : (a) memantapkan fungsi, peran, dan kedudukan agama sebagai landasan moral spiritual, dan etika dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan kehidupan bermasyarakat; (b) meningkatkan dan memantapkan kerukunan hidup antar umat beragama dalam semangat kemajemukan; (c) meningkatkan peran dan fungsi lembaga-lembaga keagamaan.

Sasaran pembangunannya meliputi : (a) mantapnya kerukunan hidup antar umat beragama dalam semangat kemajemukan; (b) mantapnya peran dan fungsi lembaga keagamaan dalam pembangunan manusia; (c) meningkatnya kualitas umat beragama; (d) meningkatnya kualitas pendidikan agama melalui penyempurnaan sistem; (e) meningkatnya pembangunan pendidikan agama baik material maupun spiritual.

Untuk mencapai sasaran pembangunan agama ditempuh program sebagai berikut :

1. Pelayanan Kehidupan Beragama

Kegiatannya meliputi : (a) Peningkatan pelayanan haji, yaitu : (1) Fasitasi dan koordinasi proses pra dan pasca pelaksanaan ibadah haji; (2) Penataran, pelatihan, dan pembinaan bagi petugas, calon haji, dan aparat pendukung; (3) Peningkatan sarana–prasarana penyelenggaraan haji; (b) Peningkatan kualitas pelayanan keagamaan meliputi : (1) Pemberian bantuan pembangunan/rehabilitasi tempat ibadah; (2) Pemberian bantuan sertifikasi tanah wakaf; (3) Penyelenggaraan pembinaan dan pelatihan masjid paripurna; (4) Peningkatan peran pranata keagamaan melalui pelatihan, penyuluhan perbaikan manajemen dan perluasan jangkauan pelayanan; (c) Penerangan dan bimbingan dalam kerukunan hidup umat beragama, yaitu melalui : (1) Pemberdayaan lembaga dakwah keagamaan; (2) Pembinaan kepada penyuluh/juru penerang agama; (3) Musyawarah/sarasehan keagamaan bagi generasi muda dan masyarakat baik antar, inter maupun dengan Pemerintah; (5) Penyelenggaraan dan pengiriman kegiatan MTQ/STQ, kegiatan seni/liturgis agama Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan kegiatan lain yang bersifat keagamaan.

2. Pembinaan Pendidikan Agama.

Kegiatannya meliputi : (a) Peningkatan mutu pendidikan agama tingkat dasar, menengah dan tinggi melalui penyempurnaan materi pendidikan, metodologi pengajaran dan sistem evaluasi; (b) Penyediaan bantuan sarana-prasarana pendidikan agama; (c) Peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan tenaga kependidikan agama baik pada pendidikan formal maupun non formal yang berkembang pada masyarakat; (d) Pemberdayaan lembaga – lembaga pendidikan keagamaan yang berkembang dan berbasis pada masyarakat.

BAB VII

PEMBERDAYAAN DAERAH

A. Aparatur Pemerintah Daerah.

Aparatur pemerintah berperan strategis sebagai fasilitator dalam proses pembangunan selaras dengan aktifnya partisipasi masyarakat. Peran ini terutama dalam tanggungjawabnya dalam mengkoordinasikan penyusunan kebijakan dan strategi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Namun permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan Aparatur Pemerintah Daerah antara lain : (a) kurangnya kualitas dan transparannya pelayanan kepada masyarakat; (b) masih lemahnya sistem pengawasan yang efektif dan efisien untuk mendukung tercapainya aparatur pemerintah yang bersih, berwibawa dan bebas dari KKN.

Kebijakan yang ditempuh, adalah : (a) penataan aparatur pemerintah daerah sesuai dengan penataan struktur organisasi dan perangkat kelembagaan daerah; (b) peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui pelayanan prima; (c) peningkatan profesionalisme dan kualitas SDM Aparatur untuk mendukung pelaksanaan tugas; (d) peningkatan sistem administrasi pemerintahan dan pembangunan; (e) pemantapan sistim perencanaan pelaksanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pembangunan; (f) peningkatan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan untuk mendukung pemerintahan yang bersih; (g) peningkatan sarana dan prasarana pemerintahan daerah.

Sasaran yang akan dicapai adalah : (a) terbentuknya organisasi dan perangkat kelembagaan yang efektif dan efisien serta sesuai dengan kapasitas kebutuhan daerah; (b) terlaksananya pelayanan prima kepada masyarakat; (c) meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan tugas; (d) meningkatnya sistem administrasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah; (e) terwujudnya perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pembangunan yang semakin mantap; (f) meningkatnya kualitas pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan; dan (g) meningkatnya sarana dan prasarana pemerintahan yang semakin memadai untuk meningkatkan produktifitas kerja.

Untuk mencapai sasaran pembangunan aparatur pemerintah daerah ditempuh program sebagai berikut :

1. Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan.

Kegiatannya meliputi : (a) Evaluasi kelembagaan perangkat daerah Propinsi Jawa Tengah; (b) Fasilitasi kelembagaan perangkat daerah pemerintahan Kabupaten/Kota; (c) Penyusunan data base kelembagaan perangkat daerah; (d) Penyusunan pengukuran efektifitas kelembagaan; (e) Penataan prosedur dan mekanisme pelayanan.

2. Peningkatan Sumber Daya Aparatur Pemerintah Daerah.

Kegiatannya meliputi : (a) Peningkatan kualitas manajemen kepegawaian, melalui : (1) Analisis Kebutuhan Diklat (AKD), (2) Analisis Kebutuhan Aparatur (AKA), (3) Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Kepegawaian, (4) Fasilitasi

penyelenggaraan Diklat di Kabupaten/Kota; (b) Pendidikan dan latihan aparatur, melalui : (1) Pra Jabatan, (2) Dalam Jabatan : Diklat Kepemimpinan, Diklat Teknis, Diklat Fungsional, (3) Diklat Kader, (4) Tugas Belajar PNS

3. Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan.

Kegiatannya meliputi : (a) Peningkatan sistim administrasi pemerintahan dan pembangunan melalui pembakuan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; (b) Pengembangan standar kinerja aparatur pemerintah daerah melalui : (1) Bimbingan teknis akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, (2) Penyusunan standar kinerja aparatur pemerintah; (c) Pemantapan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan melalui sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah; (d) Pengembangan pola pengendalian pembangunan daerah; (e) Peningkatan monitoring dan evaluasi pembangunan daerah; (f) Peningkatan kualitas pelaksanaan pengawasan, melalui : (1) Perencanaan program kerja pengawasan tahunan, (2) Koordinasi pengawasan, (3) Peningkatan kualitas penelitian LHP, (4) Penegakan disiplin aparatur, (5) Peningkatan tindak lanjut hasil pemeriksaan APF, (6) Pengelolaan penanganan kerugian negara dan kewajiban setor negara/daerah, (7) Pemeriksaan serentak hasil mutu dan manfaat proyek, (8) Evaluasi kinerja Bawasda Kabupaten/Kota.

4. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemerintahan.

Kegiatannya meliputi : (a) Penertiban dan pengamanan asset daerah; (b) Komputerisasi pengelolaan barang daerah; (c) Pengadaan dan peningkatan sarana dan prasarana pemerintahan sesuai dengan analisis kebutuhan.

B. Pemberdayaan Masyarakat

Paradigma sentralistik selama ini, kurang memberikan kreativitas kepada masyarakat dalam pengelolaan pembangunan. Semula paradigma ini diharapkan dapat mempercepat laju pembangunan, tanpa menimbulkan ketergantungan. Kegiatan yang dirancang dari atas kurang bermanfaat dan tidak sesuai dengan aspirasi serta kebutuhan masyarakat, karena proses perencanaannya tidak melibatkan partisipasi masyarakat penerima manfaat.

Pada era otonomi daerah diperlukan dukungan dan partisipasi masyarakat dalam seluruh proses pengelolaan pembangunan untuk berkembang dan keberlangsungannya pembangunan. Partisipasi masyarakat memerlukan keterlibatan tokoh-tokoh masyarakat setempat sebagai tokoh kunci, sehingga sumber daya lokal termasuk dana masyarakat dapat dimanfaatkan secara optimal dan efektif.

Dengan demikian kebijakan yang ditempuh adalah : (a) mendorong usaha masyarakat yang mengarah pada terwujudnya kemandirian masyarakat; (b) meningkatkan peran masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pemeliharaan hasil pembangunan; (c) mempermudah akses informasi dan meningkatkan penguasaan teknologi

Sasaran yang akan dicapai, meliputi : (a) meningkatnya kemampuan masyarakat dalam berorganisasi dan berfungsinya lembaga masyarakat secara optimal; (b) meningkatnya sinergi program-program pembangunan dengan kebutuhan dan kegiatan masyarakat setempat; dan (c) meningkatnya ketahanan sosial ekonomi masyarakat.

Untuk mencapai sasaran pembangunan pemberdayaan masyarakat ditempuh program sebagai berikut :

Fasilitasi Pengembangan Masyarakat

Kegiatannya meliputi : (a) Fasilitasi pengembangan usaha ekonomi rakyat melalui kegiatan : (1) Stimulan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP), (2) Peningkatan keswadayaan masyarakat melalui pengembangan pasar tradisional, (3) Pengembangan lumbung pangan; (b) Pemberdayaan Teknologi Tepat Guna (TTG) di pedesaan.

C. Otonomi Daerah.

Masalah utama yang dihadapi dalam otonomi daerah, adalah: (a) belum dipahaminya hakekat otonomi daerah yang berakibat antara lain munculnya ego daerah yang berlebihan; (b) belum optimalnya sinergi pembangunan antar sektor, antar sektor dan daerah; (c) terbatasnya kemampuan aparatur daerah dalam pelayanan masyarakat; (e) adanya konflik antar daerah mengenai penguasaan sumber daya alam dan asset ekonomi daerah.

Kebijakan yang ditempuh adalah : (a) meningkatkan pemahaman hakekat otonomi daerah; (b) mengembangkan potensi lokal dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah; dan (c) meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar daerah.

Sasaran pembangunan otonomi daerah, adalah : (a) meningkatnya pemahaman hakekat ototomi daerah; (b) terwujudnya kemandirian yang berbasis potensi lokal; dan (c) meningkatnya koordinasi dan kerjasama antar daerah.

Untuk mencapai sasaran pembangunan otonomi daerah ditempuh melalui program :

Pelaksanaan Otonomi Daerah.

Kegiatannya meliputi : (a) Fasilitasi Sosialisasi Otonomi Daerah, melalui : (1) fasilitasi sinkronisasi kewenangan Daerah; (2) fasilitasi

kebijakan otonomi daerah; (3) fasilitasi pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan Pergantian Antar Waktu (PAW); (b) Perencanaan pembangunan yang bertumpu pada kapasitas Daerah, melalui : (1) penyusunan Rencana Induk Pelaksanaan Otonomi Daerah; (2) penataan Daerah Otonom; (c) Peningkatan koordinasi dan kerjasama antar daerah, melalui pengembangan kerjasama antar daerah, dalam negeri maupun luar negeri.

BAB VIII

SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP

A. Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Kelautan.

1. Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup.

Pada saat ini pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup menghadapi tantangan berat sebagai akibat tindakan sebagian masyarakat dan pengusaha yang kurang memahami dan menyadari terhadap fungsi dan peran serta manfaat sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk mendukung kelangsungan kehidupan dan penghidupan masyarakat luas. Dalam masa krisis ini sebagian masyarakat telah memanfaatkan (eksploitasi) sumber daya alam dan lingkungan hidup yang cenderung melampaui batas daya dukung dan daya tampung lingkungan, tidak menghiraukan fungsi ruang, mengabaikan peraturan-peraturan yang berlaku, dilain pihak masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya alam sering kurang memperhitungkan pentingnya upaya rehabilitasi, konservasi dan pengolahan limbah sebagai bagian dari upaya kita memelihara kelestarian sumber daya alam.

Eksplorasi sumber daya alam dan lingkungan hidup daerah penting untuk disikapi secara arif dan bijaksana oleh semua pihak, agar tidak menimbulkan dampak negatif yang semakin parah dan merugikan penduduk. Lingkungan hidup daerah yang berkualitas memiliki peran sangat penting bagi masyarakat dan pemerintah daerah untuk kelangsungan kehidupan manusia dan pembangunan daerah, baik sebagai faktor produksi dalam bentuk sumber alam, maupun sebagai wahana dalam penyediaan jasa-jasa lingkungan, seperti pemanfaatan bahan tambang, kayu hutan, daerah resapan air hujan, tubuh perairan dan hutan lindung.

Peran Sub Sektor Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup bagi daerah adalah menopang pembangunan yang berkelanjutan, melalui : pelestarian fungsi lingkungan hidup; peningkatan kualitas lingkungan sosial; peningkatan daya dukung lingkungan buatan; pengendalian pencemaran tanah, perairan dan udara; pengendalian kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup; pemeliharaan mutu dan fungsi sumber daya alam dan lingkungan; penegakan hukum lingkungan; serta pengembangan sistem informasi lingkungan.

Kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup sebagai berikut : (a) pengembangan keserasian aktivitas pembangunan dengan daya dukung sumber daya alam dan lingkungan hidup agar dapat menopang pembangunan yang berkelanjutan; (b) mencegah dan menanggulangi pencemaran lingkungan melalui pengurangan produksi limbah, penerapan teknologi ramah lingkungan dan pengembangan strategi pencapaian baku mutu lingkungan dan baku mutu limbah; (c) meningkatkan upaya rehabilitasi dan pemulihan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang telah rusak, serta mempertahankan fungsi dan kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidup yang masih utuh; (d) memanfaatkan teknologi pengelolaan lingkungan hidup yang dapat diterapkan sesuai dengan kondisi yang ada; (e) meningkatkan kepedulian masyarakat dalam mengelola lingkungan hidup; (f) memadukan dan mensinergikan kegiatan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan dimensi ekonomi, dimensi sosial budaya dan dimensi lingkungan; (g) pengembangan upaya mediasi dalam upaya pemecahan masalah lingkungan dengan peran pemerintah sebagai fasilitator.

Sasaran pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup adalah : (a) terciptanya keseimbangan antara kemampuan daya dukung alam dan lingkungan melalui upaya pentaatan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan; (b) meningkatnya partisipasi masyarakat terhadap upaya pemeliharaan dan pengelolaan sumber daya alam secara bertanggung jawab.

Untuk mencapai sasaran pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup ditempuh program sebagai berikut :

a. Pengelolaan Lingkungan Alam.

Kegiatannya adalah : (1) Penanganan penurunan kualitas lahan bekas pertambangan rakyat, meliputi : (a) koordinasi penanganan kerusakan lahan bekas pertambangan, (b) penyuluhan teknis rehabilitasi lahan bekas pertambangan rakyat, (c) demplot penanganan lahan bekas pertambangan rakyat; (2) Penyelamatan hutan, tanah dan air, meliputi: (a) Koordinasi penanganan DAS Kali Babon, (b) Demplot pengendalian tanah longsor pada tebing sungai (gulley), (c) Penataan fungsi hutan, (d) Pengawasan peredaran satwa, liar, flora dan fauna langka, (e) inventarisasi kondisi fisik lahan pada daerah rawan gerakan tanah; (f) pengelolaan keanekaragaman hayati (*biodiversity*); (3) Pemantapan data dasar, sosialisasi Perda dan pengelolaan kawasan lindung, meliputi : (a) koordinasi pengelolaan kawasan lindung, (b) inventarisasi kerusakan daerah penyangga kawasan lindung, (c) peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat daerah penyangga kawasan lindung, (d) penyiapan revisi Perda Pengelolaan Kawasan Lindung Propinsi Jawa Tengah; (4) Konservasi, rehabilitasi dan preservasi tanah, air dan lahan, meliputi : (a) koordinasi pengendalian erosi dan sedimentasi tanah, (b) koordinasi pelaksanaan kegiatan penghijauan, (c) penyusunan pedoman rehabilitasi lahan kritis, (d) penyusunan data kerusakan lingkungan sumber daya air, (e) pembinaan pengembangan hutan rakyat; (5) Peningkatan pemantauan penggunaan air tanah dan air permukaan, yakni : pemantauan dan pengendalian fungsi daerah resapan air dan air bawah tanah; (6) penyusunan rencana induk pengelolaan lingkungan hidup Jawa Tengah.

b. Pengelolaan Lingkungan Buatan.

Kegiatannya adalah : (1) Penanganan penurunan kualitas lahan pada kawasan perkotaan, meliputi : (a) pengendalian pembuangan limbah

cair dan padat di kawasan kota, (b) inventarisasi limbah padat dan limbah B3; (2) Penanganan penurunan kualitas lahan budidaya lainnya, meliputi : (a) koordinasi pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan pada lahan budidaya lainnya, (b) koordinasi penilaian dan penerapan dokumen lingkungan, (c) pengendalian kerusakan lingkungan pada lahan perkebunan.

c. Pengelolaan Lingkungan Sosial.

Kegiatannya adalah : (1) Peningkatan kemitraan pengelolaan lingkungan, meliputi : (a) Pengembangan kerjasama antar lembaga dan masyarakat dalam pemanfaatan wilayah Kedung Ombo, (b) Koordinasi penanganan masalah sosial ekonomi masyarakat di sekitar Waduk Kedung Ombo, (c) Fasilitasi pengembangan kerjasama lintas kabupaten/kota dan propinsi dalam pengelolaan lingkungan hidup, (d) Fasilitasi kemitraan antara Masyarakat, LSM dan media massa, (e) Desiminasi Informasi bagi mitra lingkungan hidup, (f) Peningkatan kemitraan kalangan dunia usaha dalam pengendalian dampak lingkungan, (g) Penyusunan konsep Agenda 21 Daerah Prop. Jateng, (h) Penyusunan Data Base Terpadu BAPPEDAL Prop. Jateng, (i) Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Kelembagaan PLH; (2) Peningkatan kesadaran masyarakat, meliputi : (a) peningkatan pengetahuan tentang pengelolaan SDA dan LH, (b) penyusunan Neraca Kualitas Lingkungan Hidup Daerah; (3) Mediasi penyelesaian kasus lingkungan, meliputi : (a) penyelenggaraan musyawarah penanganan kasus-kasus lingkungan, (b) koordinasi penanganan kasus lingkungan, (c) advokasi terhadap masyarakat korban pencemaran dan kerusakan lingkungan.

d. Pengendalian Pencemaran Lingkungan.

Kegiatannya adalah : (1) monitoring kualitas udara dan perairan, meliputi : (a) Penyusunan baku mutu limbah cair dan emisi udara sumber bergerak, (b) Optimalisasi pemanfaatan laboratorium

lingkungan, (c) Penyusunan data kualitas udara, (emisi dan ambien), buangan air limbah, kualitas air sungai serta tingkat pencemarannya, (d) Penyusunan data kualitas dan beban cemaran pestisida/insektisida, limbah padat dan B-3 yang masuk ke perairan umum, (e) Penyusunan peruntukan sungai Serayu dan Progo; (2) pengendalian pembuangan limbah cair, padat dan bahan beracun dan berbahaya (B3), meliputi : (a) Koordinasi penyelenggaraan pengendalian pencemaran antar sektor dan wilayah terkait, (b) Penyusunan konsep Perda pengendalian pencemaran, (c) Pengendalian pembuangan limbah cair, limbah padat, gas dan bahan beracun berbahaya (B-3), (d) Pengawasan baku mutu limbah, (e) Fasilitasi perintisan pembangunan TPA limbah B-3, (f) Sosialisasi pemahaman dan penerapan program produksi bersih, (g) Peningkatan Kapasitas Anggota Komisi Penilai AMDAL Daerah, (h) Pengendalian dan pengawasan emisi gas buang kendaraan bermotor, (i) Pengadaan alat ukur emisi gas buang kendaraan bermotor, (j) Pengendalian (secara preventif) limbah industri, (k) Penyuluhan masyarakat industri dalam pencegahan timbulnya pencemaran lingkungan.

e. Penegakan Hukum Lingkungan.

Kegiatannya adalah fasilitasi penindakan secara hukum terhadap pencemaran dan perusak lingkungan.

2. Sumber Daya Kelautan

Pantai, Pesisir dan Laut sebagai sumberdaya kelautan ternyata memiliki posisi dan arti strategis baik sebagai sumberdaya hayati dan nirhayati. Kawasan tersebut mempunyai kerawanan-kerawanan namun sekaligus memiliki potensi yang cukup strategis. Kerawanan-kerawanan yang terdapat didalamnya terutama berkaitan dengan fungsi lindung/ekologis, karena kawasan ini merupakan peralihan fungsi ekosistem antara daratan dan perairan/lautan. Di dalam kawasan tersebut terdapat beraneka ragam sumberdaya alam yang spesifik, seperti terumbu

karang, hutan bakau, tempat persembunyian berbagai satwa maupun tempat pemijahan/perkembang biakan beberapa jenis ikan/biota laut.

Potensi laut di Jawa Tengah telah dimanfaatkan untuk berbagai macam kegiatan pembangunan. Dari tahun 1996-2000 potensi laut memberikan kontribusi produksi perikanan Jawa Tengah yang cukup besar nilai komoditasnya, yaitu 78,23%. Namun volume produksi penangkapan ikan di laut cenderung menurun rata-rata 0,92 % per tahun. Hal ini disebabkan oleh rusaknya habitat vital sehingga menyebabkan turunnya populasi ikan, penggunaan peralatan yang tidak ramah lingkungan, keterbatasan sarana prasarana penangkapan ikan. Selain itu lemahnya pengawasan laut telah menyebabkan hilangnya sebagian potensi ikan baik akibat pencurian ikan oleh nelayan asing, terjadinya penangkapan berlebih terutama di perairan pantai utara Jawa Tengah maupun beban kasus permasalahan lingkungan seperti pembuangan limbah secara ilegal ke laut oleh pihak-pihak yang kurang memiliki rasa tanggung jawab.

Perairan laut Jawa Tengah memiliki karakteristik ekosistem yang perlu mendapat perhatian karena telah mengalami degradasi habitat, seperti : (a) rusaknya habitat terumbu karang, di kepulauan Karimunjawa, (b) pendangkalan Laguna di Segara Anakan Cilacap; (c) rusaknya Hutan Bakau di Segara Anakan dan perairan Nusa Kambangan, Perairan Pulau Karimunjawa, dan wilayah pesisir utara Jawa Tengah; (d) pendangkalan dan terjadinya pencemaran pada muara-muara sungai sepanjang Pantai Utara dan Pantai Selatan; (e) terjadinya eksploitasi berlebihan pada pantai berpasir sepanjang Pantai Selatan.

Untuk mewujudkan pembangunan kelautan, maka ditempuh kebijakan sebagai berikut : (a) penataan wilayah pesisir dan laut dalam bentuk tata ruang wilayah laut; (b) inventarisasi potensi dan pemanfaatan kawasan pantai, pesisir dan laut serta ekosistem yang ada; (c) analisis mengenai dampak lingkungan terhadap program pembangunan yang

beresiko tinggi merusak sumberdaya kelautan; (d) analisis mengenai pengaruh sistem drainase di kota-kota besar dan atau sungai-sungai yang ada serta dampaknya atas pencemaran dari berbagai sumber terhadap mutu air di muara sungai; (e) menentukan prinsip-prinsip melindungi ekosistem pantai untuk mencegah terjadinya abrasi pantai maupun mengendalikan pemanfaatan tanah-tanah timbul; (f) memberdayakan dan menguatkan peran aktif masyarakat secara seimbang; (g) mengembangkan efektivitas dan efisiensi pendayagunaan dan perusahaan sumberdaya kelautan dan jasa-jasanya; (h) melakukan upaya pelestarian dan rehabilitasi kerusakan pantai, pesisir dan laut serta mengendalikan/pencegahan penggunaan bahan peledak, bahan racun dan bahan berbahaya lainnya yang dapat merusak ekosistem lingkungan laut; (i) meningkatkan pengawasan dan pencegahan hilangnya potensi sumber daya kelautan akibat pencurian maupun penangkapan ikan tidak legal; (j) rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut yang mengalami kerusakan, guna meningkatkan daya dukung dan kelestariannya; (k) pengembangan sistem pengawasan dalam pemanfaatan sumberdaya laut melalui perijinan usaha, pemantauan, pengendalian dan penegakan hukum; (m) pemberdayaan masyarakat pesisir.

Sasaran pembangunan kelautan meliputi : (a) meningkatnya pemanfaatan sumberdaya laut yang didorong oleh perkembangan teknologi dan kemitraan usaha berbagai pelaku usaha; (b) meningkatnya mutu lingkungan kawasan pantai, pesisir dan lautan secara menyeluruh; (c) meningkatnya populasi berbagai jenis flora, fauna dan biota laut; (d) termanfaatkannya secara benar sumber daya kawasan pesisir, pantai dan laut untuk kegiatan ekonomi dan non ekonomi; (e) terhindarnya kerugian atau kehilangan atas sumber daya kawasan pantai, pesisir dan lautan yang tidak dapat diperbaiki atau dikembalikan; (f) meningkatnya kesejahteraan masyarakat pesisir dengan tanpa merusakkan ekosistem lingkungannya; (g) terkendalinya kegiatan pembangunan di kawasan pantai dan pesisir yang beresiko tinggi; (h) meningkatnya partisipasi

masyarakat dalam pengelolaan sumber daya laut; (i) terjaganya kelestarian dan daya dukung lingkungan wilayah laut.

Untuk mencapai sasaran pembangunan sumber daya kelautan ditempuh program sebagai berikut :

a. Inventarisasi dan Evaluasi Sumberdaya Kelautan.

Kegiatannya adalah : (1) Inventarisasi, identifikasi dan evaluasi hasil riset, meliputi : (a) inventarisasi data potensi sumber daya pesisir dan laut di Pantai Utara dan Selatan Jateng, (b) identifikasi daya dukung lahan budidaya tambak di Pantai Utara, (c) pengkajian stock sumber daya ikan demersal di Pantai Utara, (d) penyusunan data dasar tingkat kerusakan wilayah pesisir dan laut; (2) penyediaan data dan informasi, yakni : (a) pemetaan lokasi *spawning ground*, *nursery ground*, *feeding ground*, *fishing ground*, (b) pemetaan zona/mintakat pemanfaatan habitat vital, (c) pengkajian stock kepiting bakau di ekosistem *mangrove*/hutan bakau.

b. Pengendalian Eksplorasi Sumberdaya Kelautan.

Kegiatannya adalah : (1) Rehabilitasi dan perbaikan hutan mangrove dan terumbu karang, yakni : (a) penanaman bakau di sekitar muara-muara sungai, (b) pengembangan terumbu karang buatan di wilayah pantai; (2) Pencegahan kerusakan ekosistem lingkungan, yakni : (a) penyusunan pedoman eksploitasi sumberdaya tambang di pesisir dan laut, (b) Penyusunan regulasi perijinan dan pedoman pengawasan eksploitasi sumberdaya tambang di pesisir dan laut, (c) Pengendalian dan pengawasan pengambilan sumberdaya tambang di pantai dan laut, (d) Penyusunan pedoman pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut spesifik lokasi, (e) Deregulasi perijinan, (f) Penyusunan kerjasama pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya perikanan dan kelautan antar sektor dan antar wilayah, (g) Penyusunan pedoman/petunjuk teknis pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya perikanan di wilayah pesisir dan laut, (h) Bimbingan teknis bagi masyarakat pesisir dalam

pengelolaan habitat ikan, (i) Mensinergikan upaya pencegahan dan pengendalian kerusakan ekosistem pantai dan pesisir secara terpadu terutama di Pantura, (j) Fasilitasi upaya pencegahan dan pengendalian kerusakan ekosistem pesisir dan laut dengan melibatkan peran serta masyarakat, (k) Penyusunan konsep panduan penetapan jalur hijau hutan mangrove; (3) Pencegahan pencurian ikan dan sumber daya alam laut, yakni : (a) Peningkatan pengawasan penangkapan ikan dilaut, (b) Peningkatan pengendalian dan pengawasan sumberdaya perikanan pantai dan laut.

c. Pengembangan Kawasan Pengembangan Ekonomi.

Kegiatannya meliputi : (1) Fasilitasi pedoman penyusunan tata ruang kawasan pengembangan ekonomi pesisir, yakni penyusunan pedoman rencana pemanfaatan ruang pantai; (2) Pengembangan peluang bisnis, yakni : (a) bimbingan teknis kewirausahaan bagi petani tambak, nelayan dan wanita nelayan, (b) pembangunan sentra pengolahan ikan.

d. Pemberdayaan Pulau-Pulau Kecil.

Kegiatannya adalah : (1) Pengembangan konservasi sumber daya ikan di Kep. Karimunjawa, meliputi : (a) Penyusunan kebijakan perlindungan dan pemanfaatan sumberdaya ikan, (b) Koordinasi pencegahan dan pengendalian kerusakan terumbu karang, (c) Pengendalian kerusakan ekosistem *mangrove*; (2) Pemberdayaan masyarakat kepulauan Karimunjawa, yakni : bimbingan teknis bagi masyarakat nelayan; (3) Pemberdayaan potensi lokal kepulauan Karimunjawa, meliputi : (a) pengembangan budidaya laut komoditas unggulan, (b) penangkaran komoditas unggulan ikan laut, (c) rehabilitasi dan pembangunan sarana dan prasarana pemasaran ikan, (d) peningkatan wisata bahari, (e) penyusunan rencana pengembangan kepulauan Karimunjawa.

e. Peningkatan Sistem Pengawasan.

Kegiatannya adalah : (1) Pemberian ijin usaha pemanfaatan potensi sumberdaya laut dan pesisir, yakni : pemantauan perijinan usaha penangkapan ikan; (2) Pemantauan dan pengawasan pemanfaatan sumberdaya laut dan pesisir, meliputi : (a) Penyusunan pedoman pemantauan, pengendalian dan pengawasan guna mencegah kerusakan pantai dan laut, (b) Penyelenggaraan FKPPS dan pengembangan MCSI, (c) Pembinaan nelayan dalam pengawasan sumber daya ikan; (3) Penetapan zonasi penangkapan ikan, meliputi : (a) penyusunan pedoman pemanfaatan zona penangkapan ikan dan sosialisasi, (b) kerjasama penyelesaian pelanggaran penangkapan ikan di laut.

f. Pemberdayaan Masyarakat Pesisir.

Kegiatannya adalah : (1) Pengembangan kemitraan usaha, meliputi : (a) peningkatan kemitraan usaha komoditas unggulan, (b) bimbingan teknis usaha perikanan bagi masyarakat pesisir, (c) koordinasi SACDP; (2) Fasilitasi bimbingan teknis ketrampilan masyarakat pesisir.

B. Penataan Ruang, Pertanahan dan Pembangunan Perwilayahan.

1. Penataan Ruang dan Pertanahan.

Dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk, meningkatnya dinamika dan ragam serta perubahan paradigma dan kebijaksanaan pembangunan disegala bidang pembangunan, maka meningkat pula aktifitas pemanfaatan ruang yang akan berdampak ketidakseimbangan fungsi lindung dan budidaya serta menurunnya kualitas dan kuantitas sumber daya alam yang sudah terbatas jumlahnya. Dengan kondisi tersebut maka ruang perlu untuk direncanakan dengan baik, pemanfaatannya seefisien dan seefektif mungkin untuk menjamin pembangunan yang

berkelanjutan dan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat secara merata.

Dalam upaya menuju kepada hal tersebut, masih dijumpai beberapa permasalahan : (a) Belum terperdakannya Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP) Jawa Tengah Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1992 pada tahun anggaran 2001; (b) Belum adanya Rencana Tata Ruang pada kawasan-kawasan Andalan dan Strategis; (c) Belum efektif dan efisiennya pemanfaatan dan pengendalian ruang, terlihat dari terjadinya pengalihan fungsi lahan dari fungsi lindung menjadi fungsi budidaya, konversi pertanian ke non pertanian dan kinerja Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) yang belum efektif serta adanya keterbatasan dan ketidak jelasan perangkat hukum, aturan, mekanisme dan prosedur dalam penataan ruang; (d) Kurangnya pemahaman dan apresiasi masyarakat umum dan aparat pemerintah terhadap pentingnya penataan ruang serta keterbatasan dan ketertinggalan data dan informasi penataan ruang dan pertanahan sebagai pelayanan masyarakat maupun dalam rangka pengelolaan pembangunan; (e) Permasalahan pertanahan Kabupaten / Kota yang masih memerlukan dukungan dari Pemerintah Propinsi terutama untuk memetakan kondisi saat ini tanah Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) dengan penelitian penguasaan persyaratan yuridisnya, masih banyak obyek landreform dan belum lengkapnya patok batas wilayah Propinsi Jawa Tengah dan Propinsi DIY.

Kebijakan yang diambil yaitu : (a) Memantapkan dan meningkatkan kualitas perencanaan dan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP) serta meningkatkan ketersediaan Rencana Tata Ruang kawasan-kawasan andalan dan strategis; (b) Meningkatkan kapasitas kelembagaan penataan ruang dan menyebarluaskan serta melaksanakan peraturan-peraturan

penataan ruang; (c) Meningkatkan pemahaman masyarakat luas terutama dunia usaha dan aparaturnya pemerintah secara berjenjang dan berkelanjutan terhadap penataan ruang; (d) Mendorong dan optimalisasi pengendalian dan pengaturan penguasaan tanah di Kab/Kota dan di lintas Kabupaten/Kota.

Sasaran yang ingin dicapai pada rencana pembangunan tahunan daerah tahun anggaran 2002 adalah : (a) terselesainya perencanaan RTRWP Jawa Tengah dengan Perda dan disepakati oleh Kabupaten/Kota; (b) Meningkatnya ketersediaan Rencana Tata Ruang pada kawasan andalan dan strategis terutama pada kawasan Joglosemar dan Wilayah Pantura; (c) Meningkatnya sinkronisasi dan fasilitasi kerjasama perencanaan dan rencana tata ruang antar Propinsi/Kab/Kota/kawasan terutama di kawasan perbatasan dan atau lintas kepentingan/kemanfaatan pada kawasan andalan dan kawasan strategis; (d) Meningkatnya kualitas dan kapasitas TKPRD dengan mendasarkan pada profesionalisme, partisipatif dan kepentingan masyarakat luas; (e) Meningkatnya ketersediaan dan kejelasan petunjuk dan aturan teknis dalam penataan ruang dan pertanahan; (f) Meningkatnya pemahaman dan partisipasi *stakeholders* secara bertahap terutama dimulai dari aparaturnya pemerintah; (g) Meningkatnya teknologi dan sistem informasi penataan ruang dan pertanahan; (h) Meningkatnya optimalisasi penataan dan pengendalian pertanahan lintas Kab/Kota.

Untuk mencapai sasaran tersebut ditempuh program sebagai berikut :

a. Peningkatan Perencanaan dan Rencana Tata Ruang.

Kegiatannya meliputi : (1) Penyusunan Revisi Perda Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Tengah Perda. No.8 Tahun 1992; (2) Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Andalan;

(3) Penyusunan Struktur dan Program Prasarana dan Sarana Dasar (PSD-PU) Kawasan Strategis; (4) Peningkatan Rencana Pengembangan Wilayah/Kawasan Industri.

b. Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Kelembagaan Penataan Ruang.

Kegiatannya meliputi : (1) Peningkatan kualitas dan kapasitas kelembagaan Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD); (2) Pemantauan dan Pengendalian Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang Propinsi sesuai RTRWP; (3) Pengkajian Peraturan dan Petunjuk Teknis dalam Penataan Ruang

c. Peningkatan Pemahaman Masyarakat dan Pelayanan Dalam Penataan Ruang.

Kegiatannya meliputi : (1) Pendampingan Penyusunan Rencana Tata Ruang Kab/Kota; (2) Pengembangan Sistem dan Informasi Perkotaan dan Penataan Ruang.

d. Optimalisasi Penataan dan Pengendalian Pertanahan Lintas Kabupaten/Kota.

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan : (1) Inventarisasi tanah Hak Guna Usaha dan Hak Pengelolaan Lahan; (2) Pelaksanaan dan Pengendalian Obyek Landreform; (3) Pembangunan Patok Batas Wilayah Propinsi Jawa Tengah dan Propinsi DIY.

2. Pembangunan Perwilayahan.

Dalam pembangunan perwilayahan dijumpai beberapa permasalahan, yaitu meliputi : (a) masih adanya kesenjangan antar wilayah, antar kota dan antara kota dan desa; (b) masih berlangsungnya penurunan kualitas dan kuantitas sumber daya alam (SDA) di beberapa wilayah, khususnya pada kawasan-

kawasan strategis; (c) Belum efektif dan efisiennya pengelolaansarana dan prasarana wilayah terutama Air Bersih dan Penyehatan Lingkungan Permukiman (AB-PLP) dilintas Kab/Kota; (d) Banyaknya permukiman kumuh dan padat serta rendahnya kualitas hunian di perkotaan dan perdesaan.

Dalam upaya menangani permasalahan permasalahan tersebut kebijakan yang ditempuh adalah : (a) Mendorong dan meningkatkan terwujudnya pembangunan perwilayahan fungsional; (b) Meningkatkan pengelolaan dan ketersediaan sarana dan prasarana wilayah; (c) Mendukung dan mendorong perbaikan perumahan dan permukiman bagi masyarakat terutama kurang mampu; (d) Mendukung dan mendorong penanganan permasalahan pembangunan perkotaan dan perdesaan khususnya penangananan permukiman padat dan kumuh.

Sasaran yang ingin dicapai adalah : (a) Meningkatnya pengelolaan pembangunan perwilayahan terutama pada kawasan andalan dan kawasan strategis di Jawa Tengah; (b) Meningkatnya pengelolaan dan ketersediaan sarana dan prasarana wilayah terutama AB-PLP; (c) Meningkatnya pengelolan dan penanganan permukiman padat dan kumuh serta relokasi korban bencana alam; (d) Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman pada permukiman kumuh dan padat di perkotaan dan perdesaan; (e) Meningkatnya kemampuan apresiasi aparatur dalam pengembangan wilayah.

Untuk mencapai sasaran pembangunan perwilayahan ditempuh program sebagai berikut :

a. Pengembangan Pengelolaan Pembangunan Perwilayahan

Kegiatannya meliputi : (1 Penyusunan Strategi Pembangunan dan Pengelolaan Pembangunan Perwilayahan Propinsi Jawa Tengah; (2) Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan perencanaan

pembangunan perwilayahan; (3) Pengembangan penataan kawasan permukiman di daerah perbatasan antar Kab/kota di Kawasan Strategis.

b. Peningkatan Keterpaduan dan Kerjasama Pengelolaan Pembangunan Perwilayahan.

Kegiatannya meliputi : (1) Koordinasi Pengendalian Banjir di Propinsi Jawa Tengah; (2) Peningkatan pembinaan pemanfaatan, pengelolaan dan pemantauan pengelolaan sarana dan prasarana AB-PLP; (3) Peningkatan pembinaan program pengembangan Kecamatan.

c. Pemantapan, Peningkatan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Wilayah.

Kegiatannya meliputi : (1) Peningkatan kapasitas dan pelayanan AB-PLP lintas Kab/Kota sesuai dengan kemampuan dan batas kewenangan; (2) Perintisan pembangunan sarana dan prasarana AB-PLP.

d. Penguatan dan Dukungan Penanganan Permasalahan Pembangunan Perkotaan dan Perdesaan.

Kegiatannya meliputi : (1) Peningkatan dan pemantapan penanganan permukiman kumuh; (2) Dukungan pembangunan prasarana lingkungan relokasi korban bencana alam; (3) Perbaikan perumahan dan permukiman di permukiman padat dan kumuh perkotaan dan perdesaan.

BAB IX

PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

Dengan diberlakukannya UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, terjadi perubahan paradigma dalam pengalokasian pembiayaan pembangunan yang berasal dari pusat. Selama lima tahun terakhir (1996/1997 sampai dengan tahun 2000), kontribusi pembiayaan pembangunan dari pusat rata-rata mencapai 63,71 %, sedangkan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Propinsi rata-rata hanya 1,78 %. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan pembiayaan pembangunan dari pusat masih sangat tinggi dan peran pendapatan asli daerah dalam pembangunan masih sangat kecil.

Kemampuan anggaran tahun 2001 untuk pendapatan dari target/murni sebesar Rp. 1.237, 65 milyar, setelah perubahan terdapat kenaikan pendapatan sebesar Rp. 483,53 milyar sehingga diperkirakan pendapatan tahun 2001 menjadi Rp. 1.721,18 milyar. Sedangkan untuk belanja pada tahun 2001 meliputi belanja rutin pada penetapan/murni sebesar Rp. 928,65 milyar setelah perubahan mengalami kenaikan Rp. 399,89 milyar sehingga untuk belanja rutin diperkirakan menjadi sebesar Rp. 1.328,54 milyar, sedangkan untuk belanja pembangunan pada penetapan/murni sebesar Rp. 309,01 milyar setelah perubahan mengalami penambahan sebesar Rp. 83,64 milyar sehingga belanja pembangunan menjadi Rp. 392,65 milyar. Dengan demikian jumlah belanja rutin dan pembangunan pada tahun 2001 diperkirakan mencapai sebesar Rp. 1.721,19 milyar.

Dengan adanya sistim pembiayaan dari pusat melalui dana perimbangan, membawa konsekuensi agar daerah lebih mampu meningkatkan kemandiriannya dalam membiayai pembangunan melalui penggalan sumber-sumber PAD dan pengembangan potensi-potensi daerah serta peningkatan peran serta masyarakat. Strategi kebijakan pembiayaan pembangunan daerah dalam rangka memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan tahun 2002 diarahkan melalui :

1. Optimalisasi sumber-sumber PAD yang ada dan penggalan sumber-sumber PAD baru.
2. Revisi perda-perda yang berkaitan dengan PAD yang tidak sesuai dengan kondisi dan situasi saat ini.
3. Upaya menggali sumber-sumber pendapatan dari asset-asset pemerintah pusat yang diserahkan ke daerah.
4. Mendorong peningkatan partisipasi masyarakat.
5. Pemanfaatan pendapatan daerah diupayakan untuk memperoleh hasil guna dan daya guna yang optimal

Dalam rangka memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan, berdasarkan BPS Jawa Tengah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tahun 2002 yang diprediksikan sebesar 3,5%, dengan perkiraan inflasi 6% - 8%, dan ICOR sebesar 4, maka diperkirakan kebutuhan pembiayaan pembangunan tahun 2002 baik di swasta maupun pemerintah (Pusat, Propinsi, Kabupaten/Kota) sebesar Rp 6.488,66 milyar. Dari kebutuhan ini diharapkan 65% dapat didukung oleh sektor swasta, sedangkan dari pemerintah 35%. Pembiayaan pembangunan dari pemerintah yang berasal dari pusat melalui dana perimbangan diperkirakan dapat mencapai Rp 900,90 milyar atau naik 30 % dari target tahun 2001 sebesar Rp. 693,07 milyar. Sedangkan dari PADS Propinsi diperkirakan mencapai Rp 662,90 milyar atau naik 25% dari target pendapatan tahun 2001 sebesar Rp. 498,35 milyar. Untuk itu

lapangan usaha potensial yang perlu mendapatkan prioritas yaitu industri pengolahan, perdagangan, hotel dan restoran serta pertanian.

Pada tahun 2002 diharapkan ada peningkatan dalam penegakan supremasi hukum yang mendekati realitas, peningkatan pelayanan sosial dasar termasuk di bidang pendidikan, kesehatan dan peningkatan daya beli masyarakat. Oleh karena itu merupakan landasan yang baik untuk upaya percepatan pemulihan kondisi ekonomi dan langkah untuk membangun landasan perekonomian kerakyatan di masa depan.

Prediksi penerimaan daerah dari pusat dimaksudkan untuk mengantisipasi kenaikan biaya rutin sebagai akibat penyerahan aparatur pusat ke daerah yang diperkirakan mencapai Rp. 1.602,22 milyar atau naik 20,6 % dibanding target tahun 2001 sebesar Rp. 1.328,54 milyar. Kebutuhan biaya pembangunan tahun 2002 diperkirakan mencapai Rp. 555,78 milyar atau naik 41,55 % dari tahun 2001 sebesar Rp. 392,64 milyar.

BAB X

PENUTUP

Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (REPETADA) tahun 2002 merupakan acuan atau pedoman dalam penyusunan rencana program/kegiatan pembangunan bagi badan/dinas/kantor dan satuan kerja pemerintah Propinsi Jawa Tengah dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum maupun tugas-tugas pembangunan dengan tetap mempertimbangkan kemampuan daerah, berorientasi pada pemecahan masalah dan memperhatikan aspirasi dan dinamika yang berkembang. Dengan berpedoman pada REPETADA ini diharapkan terjadi konsistensi dan sinkronisasi serta sinergis, sehingga hasil-hasil pembangunan dapat dirasakan manfaatnya oleh rakyat banyak secara merata dan adil.

Disadari sepenuhnya bahwa keberhasilan pembangunan daerah ditentukan juga oleh partisipasi masyarakat dan dunia usaha serta tergantung pula pada sikap mental, tekad dan semangat, ketaatan, kejujuran dan disiplin dari para penyelenggara dan pelaku pembangunan itu sendiri. Hasil-hasil pembangunan tersebut diharapkan merata ke seluruh wilayah dan lapisan masyarakat, mampu meningkatkan kegiatan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi serta dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan lahir batin dalam suasana yang demokratis, tentram, aman dan damai.